

JURNAL STUDI ILMU POLITIK

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JSIPO>

Published by:
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang



VOLUME 5, (ISSUE 1, JANUARI, 2026)

JURNAL STUDI ILMU POLITIK

**DETERMINASI POLITIK TERHADAP KINERJA REFORMASI BIROKRASI DI
KEMENTERIAN PERTAHANAN : KOMPETENSI SDM, TATA KELOLA, DAN
DESAIN REFORMASI KONTEKSTUAL**

Faonaso Harefa, Yaya Mulyana Abdul Aziz, Teddy Hikmat Fauzi, 1 - 17

**KOALISI PARTAI POLITIK DALAM MENGUSUNG CALON TUNGGAL DI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024**

Yessica Aulia Putri Hidayat, Aidinil Zetra, Zulfadli, 18 - 27

**STRATEGI PARTAI GOLKAR DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN
SUARA PADA PEMILU JAWA BARAT 2024**

*Satryo Putra Pratama, Elysam Alfari, Yanuar Alfiansyah,
Muhammad Andi Septiadi, 28 - 46*

**BANTUAN SOSIAL SEBAGAI SARANA KEKUATAN POLITIK:
MENGURAI BATAS TIPIS DENGAN POLITIK UANG DI PEMILU PADANG 2024**

Tessa Agustina, Doni Hendrick, 47 - 58

**PERAN WEAK TIES PADA X TERHADAP PARTISIPASI PROTES
MAHASISWA DI INDONESIA**

*Raysa Madinah Azzahra, Kunto Adi Wibowo, Ikhsan Fuady, Detta Rahmawan,
59 - 68*

VOLUME 5

ISSUE 1

PAGE
1-68

JANUARI
2026

PUBLISH BY :

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG**

DETERMINASI POLITIK TERHADAP KINERJA REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN PERTAHANAN: KOMPETENSI SDM, TATA KELOLA, DAN DESAIN REFORMASI KONTEKSTUAL

Faonaso Harefa¹, Yaya Mulyana Abdul Aziz², Teddy Hikmat Fauzi³

Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Ilmu Sosial, Universitas Pasundan Bandung¹²³

E-mail Coresponden : faonaso.harefa@doktoral.idu.ac.id

ABSTRACT

Background: Bureaucratic reform is a government program to realize a clean, effective, transparent, and accountable administration for public service. However, as of 2025, the achievement of the Bureaucratic Reform Index, the Electronic-Based Government System (SPBE), and the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP) in the Ministry of Defence has not yet reached the targeted standards. Objective: This study identifies obstacles to achieving the targets of the Bureaucratic Reform Index, SPBE, and SAKIP in the Ministry of Defence. Methods: This research employs a quantitative approach, with data analysed using Structural Equation Modelling Partial Least Squares (SEM-PLS 4). Results: The findings show that the competencies of Civil Servants (ASN) and military personnel exert a significant and positive effect on bureaucratic reform in the Ministry of Defence (T -statistics = 5886.822; p -value = 0.000; F^2 = 0.054). The contextual grand design of bureaucratic reform has a significant and positive influence on the achievement of bureaucratic reform outcomes (T -statistics = 3.367; p -value = 0.001; F^2 = 0.010). In contrast, the national bureaucratic reform framework does not display a significant positive effect on the contextual grand design in the Ministry of Defence, because it functions primarily as a mediating variable (T -statistics = 0.488; p -value = 0.626; F^2 = 99,027.865). Conclusion: The overall achievement of bureaucratic reform, SPBE, and SAKIP in the Ministry of Defence is determined by personnel competence. A contextual bureaucratic reform grand design must be formulated, and reform performance strengthened through human resource capacity enhancement aligned with national reform policies.

Keywords: Bureaucracy; Apparatus Capacity; Contextual Policy; Defense Reform; Governance.

ABSTRAK

Latar Belakang: Reformasi birokrasi adalah program pemerintah untuk mewujudkan administrasi pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, hingga tahun 2025, pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pertahanan belum mencapai standar yang ditargetkan. Tujuan: Studi ini mengidentifikasi hambatan dalam mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, SPBE, dan SAKIP di Kementerian Pertahanan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling Partial Least Squares (SEM-PLS 4). Hasil: Temuan menunjukkan bahwa kompetensi Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan personel militer memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan (statistik T = 5886,822; nilai p = 0,000; F^2 = 0,054). Desain besar kontekstual reformasi birokrasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pencapaian hasil reformasi birokrasi (statistik T = 3,367; nilai p = 0,001; F^2 = 0,010). Sebaliknya, kerangka reformasi birokrasi nasional tidak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap desain besar kontekstual di Kementerian Pertahanan, karena terutama berfungsi sebagai variabel mediasi (statistik T = 0,488; nilai p = 0,626; F^2 = 99.027,865). Kesimpulan: Keberhasilan keseluruhan reformasi birokrasi, SPBE, dan SAKIP di Kementerian Pertahanan ditentukan oleh kompetensi personel. Rancangan besar reformasi birokrasi yang kontekstual harus dirumuskan, dan kinerja reformasi harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang selaras dengan kebijakan reformasi nasional.

Keywords: Birokrasi; Kapasitas Aparatur; Kebijakan Kontekstual; Reformasi Pertahanan; Tata Kelola.

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi nasional merupakan agenda strategis pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penetapan dan penerapan *Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional* sebagaimana diatur oleh Kementerian PANRB (Melin et al., 2024). Dalam konteks pertahanan negara, reformasi ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat efektivitas kelembagaan, efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk akuntabilitas publik di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan delapan aspek perubahan yang ditetapkan dalam *Grand Desain* reformasi nasional, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, terlihat bahwa arah kebijakan reformasi birokrasi bersifat komprehensif dan saling terintegrasi (Adiananto et al., 2024).

Kondisi saat ini bahwa implementasi reformasi birokrasi nasional di jajaran kementerian yang sudah berlangsung sejak 2014 sampai dengan tahun 2024, belum mencapai capai yang maksimal “amat aman”. Berdasarkan laporan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB tahun 2024, capaian indeks reformasi birokrasi pada aspek pertahanan menunjukkan hasil yang belum optimal, hal ini dapat dilihat dari nilai capaian indeks reformasi birokrasi (2024) sebesar 78,79 persen dari 100 persen, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,43 dari 5,00, serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 76 persen dari 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang perlu ditingkat dan diperbaiki pada reformasi birokrasi di kementerian Pertahanan dan TNI (Clement et al., 2023).

Kondisi yang diharapkan dari implementasi reformasi birokrasi nasional di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI adalah terwujudnya tata kelola pertahanan negara yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel melalui pelaksanaan *Grand Design Reformasi Birokrasi* secara konsisten dan berkesinambungan. Idealnya, pada periode 2014-2024, reformasi birokrasi mampu menghasilkan capaian yang maksimal pada seluruh indikator kinerja utama, dengan indeks reformasi birokrasi mencapai atau mendekati 100 persen, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berada di atas 4,5 dari skala 5, serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendekati 100 persen. Kondisi tersebut diharapkan mencerminkan terbangunnya birokrasi pertahanan yang profesional, adaptif terhadap inovasi teknologi, transparan dalam pengelolaan anggaran dan kinerja, serta berorientasi pada hasil (Lapuente & Van de Walle, 2020).

Penelitian terdahulu oleh Firdaus Arifin dan Dewi Asri Yustia (2022) berjudul *Bureaucratic Reform as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia* menegaskan bahwa reformasi birokrasi berfungsi sebagai mekanisme strategis dalam pencegahan korupsi melalui perubahan pola pikir birokrat dan penguatan instrumen pengendalian internal. Penelitian oleh A. Annisa Nurul Ramadhani, Muh. Nur Sadiq, dan Muhammad Rusdi (2022) dalam artikel *Bureaucratic Reform at the Directorate of Politics and General Government, Ministry of Home Affairs* mengungkapkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten melalui penyederhanaan struktur organisasi, perubahan pola kerja, dan penerapan teknologi informasi telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik (Williams, 2021).

Penelitian oleh P. Septanoris (2023) dalam penelitiannya *Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa* menyoroti bahwa penerapan *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* di lingkungan Kementerian Pertahanan merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang terbukti meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja organisasi. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh implementasi *Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional* terhadap capaian reformasi birokrasi pada aspek pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Penelitian ini juga berupaya menjawab sejauh mana profesionalisme aparatur dan prajurit berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kebijakan reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas tata kelola pertahanan negara (Bauwens & Meyfroodt, 2021).

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik dan manajemen pertahanan dengan menelaah efektivitas implementasi *Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional* di sektor pertahanan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang peran profesionalisme aparatur dalam tata kelola birokrasi pertahanan, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi strategis bagi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja kelembagaan (Yudha Bramantyo & Yuliasuti, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi *Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional* terhadap capaian reformasi birokrasi pada aspek pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI (Ramadhan et al., 2022). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana profesionalisme aparatur dan prajurit berperan sebagai faktor mediasi yang memperkuat keterkaitan antara kebijakan reformasi birokrasi dengan

peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola kelembagaan pertahanan negara secara berkelanjutan (Lesmana et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (Chauhan, 2022). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 200 responden yang terdiri dari personel TNI dan ASN non eselon di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur tingkat persepsi responden terhadap implementasi reformasi birokrasi, mulai dari nilai 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju) (Yang et al., 2022).

Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) PLS 4 untuk menguji hubungan kausal antara Variabel Independen (X): Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional; Variabel Dependen (Y): Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pertahanan, dan Variabel Mediasi (M): Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan Prajurit TNI. Pada analisis SEM PLS-4 yang menjadi indikator meliputi; Evaluasi Outer Model meliputi; Uji validitas (Nilai outer loading yang direkomendasikan 0,70); Uji Reliabilitas (Nilai Cronbach's alpha dan Composite reliability, minimum adalah 0,70); Validitas konvergen (Average Variance Extracted, direkomendasikan minimal 0.50); dan Validitas Diskriminan diukur dengan Fornell Lacker Criterion dan HTMT apabila Akar AVE > korelasi antara variable serta dari Kriteria HTMT (Heterotrait Monotrait Ratio) Nilai yang diterima dibawah 0,90 yang mengindikasikan evaluasi discriminant validity diterima (Legate et al., 2023).

Inner Model, meliputi pengujian hipotesis dimana bila p-value hasil pengujian koefisien jalur < 0,05 maka hipotesis diterima atau ada pengaruh signifikan antara variabel yang dihipotesiskan. Bila p-value koefisien jalur mediasi kurang dari 0,05 maka ada pengaruh mediasi signifikan antara variabel. Nilai effect size f square (f square 0,02 adalah pengaruh rendah; 0,15 adalah pengaruh sedang; dan 0,35 adalah pengaruh tinggi) (Guenther et al., 2023).

Kebajikan kecocokan model, yang dapat dilihat dari nilai R square, Nilai R square secara kualitatif dibawah 0,00 - 0,19, maka pengaruh rendah, nilai dibawah 0,20-0,33 dikatakan pengaruh moderat dan nilai 04-0,66 dikatakan pengaruh tinggi. Nilai Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) nilai SRMR dibawah 0,08 -0,10 menunjukkan model fit (cocok). PLS Predict, Model PLS dikatakan mempunyai kekuatan prediksi bila ukuran RMSE (Root mean squared error) atau MAE (mean absolute error model PLS lebih rendah dibandingkan model regresi linier (LM). Cross-validated predictive ability test (CVPAT), bila hasil perbedaan loss average PLS lebih rendah dari

kedua algoritma lainnya maka model PLS mempunyai daya prediksi tinggi atau lebih baik(Vukovi'c, 2024).

Hipotesis:

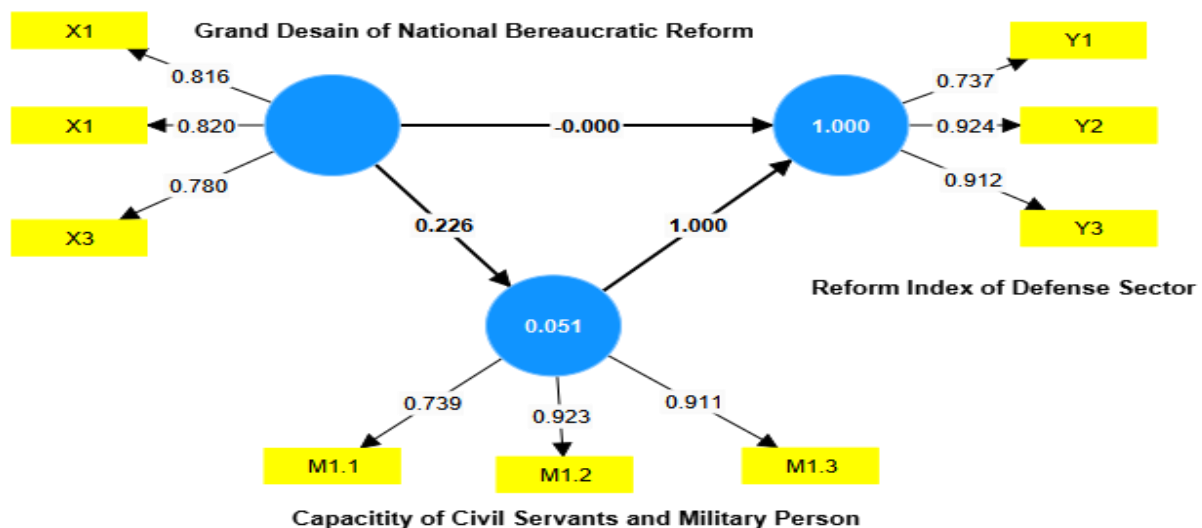
H1: *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* berpengaruh positif terhadap Kapasitas Aparatur Sipil Negara dan Prajurit TNI.

H2: Kapasitas Aparatur Sipil Negara dan Prajurit TNI berpengaruh positif terhadap Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Aspek Pertahanan.

H3: *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* berpengaruh positif terhadap Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Aspek Pertahanan melalui Kapasitas Aparatur Sipil Negara dan Prajurit TNI sebagai variabel mediasi(Yusuf et al., 2024).

HASIL DAN DISKUSI

Figure1. Outer loading-Validitas



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Gambar di atas menunjukkan hasil uji validitas indikator melalui nilai *outer loading* dalam model *Structural Equation Modeling (SEM) PLS-4*. Berdasarkan kriteria validitas konvergen, indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai *outer loading* $\geq 0,70$. Pada gambar tersebut, seluruh indikator pada variabel *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* (X1–X3), *Kapasitas Aparatur Sipil Negara dan Prajurit TNI* (M1.1–M1.3), serta *Capaian Reformasi Birokrasi Aspek Pertahanan* (Y1–Y3) menunjukkan nilai *outer loading* di atas 0,70, berkisar antara 0,737 hingga 0,924. Hal ini

membuktikan bahwa setiap indikator mampu menjelaskan variabel latennya secara kuat dan konsisten (Tiwisia et al., 2020).

Table 1. Construct Reliability and Validity

Variable	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho a)	Composite reliability (rho c)	Average variance extracted (AVE)
Capacity of Civil Servants and Military Person	0.821	0.840	0.895	0.742
Grand Desain of National Beraucratic Reform	0.730	0.730	0.847	0.649
Reform Index of Defense Sector	0.821	0.841	0.895	0.742

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil uji reliabilitas dan validitas konstruk pada tabel menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria yang direkomendasikan untuk penelitian berbasis *Partial Least Squares (PLS)*. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability masing-masing berada di atas ambang batas minimum 0,70 dengan rentang antara 0,730 hingga 0,895 yang menandakan bahwa seluruh item pertanyaan dalam setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang kuat dan dapat dipercaya untuk mengukur variabel latennya.

Selain itu, nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk ketiga variabel, yaitu *Capacity of Civil Servants and Military Personnel* (0,742), *Grand Design of National Bureaucratic Reform* (0,649), dan *Reform Index of Defense Sector* (0,742), semuanya melebihi batas minimum 0,50, yang berarti indikator-indikator dalam masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians dari variabel yang diukur. Dengan demikian, hasil ini membuktikan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen, serta layak digunakan untuk menguji hubungan kausal antara implementasi *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional*, peningkatan kapasitas aparatur, dan capaian reformasi birokrasi di sektor pertahanan (Afifi & Abbas, 2023).

Table 2. Fornell Lacker Criterion

Variable	Capacity of Civil Servants and Military Person	Grand Desain of National Beraucratic Reform	Reform Index of Defense Sector
Capacity of Civil Servants and Military Person	0.862		

Variable	Capacity of Civil Servants and Military Person	Grand Desain of National Bereaucratic Reform	Reform Index of Defense Sector
Grand Desain of National Bereaucratic Reform	0.226	0.806	
Reform Index of Defense Sector	1.000	0.226	0.862

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil uji validitas diskriminan menggunakan *Fornell-Larcker Criterion* pada tabel menunjukkan bahwa akar nilai Average Variance Extracted (AVE) dari masing-masing variabel lebih tinggi dibandingkan korelasi antarvariabelnya. Nilai diagonal pada tabel (0,862 untuk *Capacity of Civil Servants and Military Personnel*, 0,806 untuk *Grand Design of National Bureaucratic Reform*, dan 0,862 untuk *Reform Index of Defense Sector*) semuanya lebih besar dari nilai korelasi di luar diagonal (0,226 dan 1,000).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki kemampuan diskriminatif yang baik, artinya masing-masing variabel mampu membedakan dirinya dari variabel lain secara jelas. Selain itu, hasil pengujian *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)* dengan nilai di bawah 0,90 turut memperkuat kesimpulan bahwa model memenuhi kriteria validitas diskriminan, sehingga konstruk yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid (Umar et al., 2021).

Table 3. Discriminant Validity-Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Variable	Capacity of Civil Servants and Military Person	Grand Desain of National Bereaucratic Reform	Reform Index of Defense Sector
Capacity of Civil Servants and Military Person			
Grand Desain of National Bereaucratic Reform	0.295		
Reform Index of Defense Sector	1.217	0.295	

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) pada tabel menunjukkan bahwa nilai korelasi antara konstruk *Grand Design of National Bureaucratic Reform*

dengan *Capacity of Civil Servants and Military Personnel* adalah 0,295, sedangkan antara *Capacity of Civil Servants and Military Personnel* dengan *Reform Index of Defense Sector* sebesar 1,217. Berdasarkan kriteria yang direkomendasikan, nilai HTMT yang dapat diterima harus berada di bawah 0,90 untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki perbedaan konseptual yang jelas. Dengan demikian, hasil uji menunjukkan bahwa hubungan antara *Grand Design* dan *Capacity* masih memenuhi kriteria validitas diskriminan, namun hubungan antara *Capacity* dan *Reform Index* melebihi ambang batas yang disarankan.

Hal ini mengindikasikan adanya potensi *overlap konseptual* antara kedua konstruk tersebut, di mana indikator pengukuran kapasitas aparatur dan capaian reformasi birokrasi pertahanan memiliki kesamaan dimensi empiris yang cukup tinggi. Meskipun demikian, nilai Average Variance Extracted (AVE) yang sebelumnya telah memenuhi batas minimal 0,50 tetap menunjukkan bahwa secara validitas konvergen, setiap konstruk mampu menjelaskan varians indikatornya dengan baik. Oleh karena itu, meskipun model secara umum valid secara konvergen, diperlukan penyempurnaan dalam pemilihan atau pengelompokan indikator agar diskriminasi antarvariabel laten menjadi lebih kuat (Saputra et al., 2021).

Inner Model

Table 4. Pengujian Hipotesis

Variable	T statistics	P values
Capacity of Civil Servants and Military Person to Reform Index of Defense Sector	5886.822	0.000
Grand Desain of National Bereaucratic Reform to Capacity of Civil Servants and Military Person	3.367	0.001
Grand Desain of National Bereaucratic Reform to Reform Index of Defense Sector	0.488	0.626

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Inner Model yang disajikan pada Tabel 4, dapat dijelaskan bahwa hubungan antarvariabel dalam penelitian ini menunjukkan tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Hubungan pertama antara *Capacity of Civil Servants and Military Personnel* terhadap *Reform Index of Defense Sector* memperoleh nilai *T-statistics* sebesar 5886.822 dengan *p-value* 0.000, yang jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kapasitas aparatur dan prajurit terhadap capaian reformasi birokrasi pada aspek pertahanan. Artinya, semakin tinggi tingkat kompetensi teknis, integritas, inovasi, dan adaptabilitas personel TNI serta ASN di lingkungan pertahanan, semakin besar pula peningkatan efektivitas dan

akuntabilitas capaian reformasi birokrasi pertahanan. Temuan ini memperkuat peran strategis sumber daya manusia sebagai elemen utama dalam keberhasilan implementasi reformasi birokrasi nasional di sektor pertahanan(Oliveira et al., 2024).

Hubungan kedua, yaitu antara Grand Design of National Bureaucratic Reform terhadap Capacity of Civil Servants and Military Personnel, menunjukkan nilai *T-statistics* sebesar 3.367 dan *p-value* 0.001, yang berarti hipotesis diterima karena nilai *p* lebih kecil dari 0.05. Hasil ini menegaskan bahwa pelaksanaan *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan prajurit TNI. Implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang mencakup delapan area perubahan seperti penataan organisasi, tata laksana, sistem SDM, serta penguatan akuntabilitas terbukti mampu meningkatkan kompetensi teknis, profesionalisme, dan kemampuan adaptif personel pertahanan terhadap perubahan sistem pemerintahan modern. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak langsung pada penguatan sumber daya manusia pertahanan(Ayugo & Septiana, 2021).

Hubungan ketiga antara Grand Design of National Bureaucratic Reform terhadap Reform Index of Defense Sector menunjukkan hasil yang berbeda. Nilai *T-statistics* hanya 0.488 dengan *p-value* 0.626, yang jauh di atas ambang batas signifikansi 0.05. Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara kebijakan *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* dengan capaian reformasi birokrasi aspek pertahanan. Artinya, penerapan reformasi birokrasi nasional belum secara langsung meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan dan TNI, kemungkinan karena proses transformasi birokrasi masih menghadapi hambatan struktural, resistensi budaya organisasi, dan keterbatasan anggaran untuk mendukung implementasi di tingkat operasional. Oleh karena itu, pengaruh kebijakan reformasi birokrasi nasional lebih bersifat tidak langsung melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertahanan(Budi & Wahyudi, 2024).

Kapasitas aparatur dan prajurit TNI berperan sebagai variabel mediasi signifikan dalam hubungan antara *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* dan capaian reformasi birokrasi pertahanan. Meskipun kebijakan reformasi birokrasi secara langsung belum berdampak kuat terhadap capaian indeks reformasi pertahanan, efeknya muncul melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur pertahanan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan reformasi birokrasi nasional hanya akan efektif jika disertai dengan pembangunan kapasitas manusia yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan SDM menjadi kunci strategis dalam mengoptimalkan dampak

reformasi birokrasi terhadap efektivitas tata kelola pertahanan negara yang modern, transparan, dan akuntabel (Tang et al., 2022).

Table 5. F-square

Variable	Capacity of Civil Servants and Military Person	Grand Desain of National Beraucratic Reform	Reform Index of Defense Sector
Capacity of Civil Servants and Military Person			99027.865
Grand Desain of National Beraucratic Reform	0.054		0.010
Reform Index of Defense Sector			

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil uji F-Square (Effect Size) pada tabel menunjukkan besarnya kontribusi atau pengaruh antarvariabel dalam model struktural. Nilai F-square sebesar 0,054 antara *Grand Design of National Bureaucratic Reform* terhadap *Capacity of Civil Servants and Military Personnel* menunjukkan adanya pengaruh kecil namun signifikan, yang berarti reformasi birokrasi nasional memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur dan prajurit, meskipun tidak terlalu besar.

Sementara itu, nilai F-square sebesar 0,010 antara *Grand Design of National Bureaucratic Reform* terhadap *Reform Index of Defense Sector* menunjukkan pengaruh yang sangat lemah, sejalan dengan hasil pengujian hipotesis sebelumnya yang menunjukkan hubungan langsung tidak signifikan. Sebaliknya, nilai F-square yang sangat tinggi (99.027,865) antara *Capacity of Civil Servants and Military Personnel* terhadap *Reform Index of Defense Sector* menunjukkan pengaruh yang sangat besar dan dominan, menandakan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor paling kuat dalam menentukan capaian reformasi birokrasi pertahanan (Macro et al., 2023).

Kebaikan dan kecocokan model

Table 6. R- square

Variable	R-square	R-square adjusted
Capacity of Civil Servants and Military Person	0.051	0.046
Reform Index of Defense Sector	1.000	1.000

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil uji R-square pada tabel menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam model penelitian. Nilai R-square sebesar 0,051 untuk variabel *Capacity of Civil Servants and Military Personnel* mengindikasikan bahwa variabel *Grand Design of*

National Bureaucratic Reform hanya mampu menjelaskan sekitar 5,1% variasi perubahan kapasitas aparatur dan prajurit TNI, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai ini dikategorikan rendah karena berada di bawah 0,19. Sebaliknya, variabel *Reform Index of Defense Sector* memiliki R-square sebesar 1,000, yang berarti model mampu menjelaskan 100% variasi pada capaian reformasi birokrasi aspek pertahanan secara sempurna.

Nilai yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kecocokan (*goodness of fit*) yang sangat kuat, di mana kombinasi antara kebijakan *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* dan kapasitas aparatur berhasil sepenuhnya menjelaskan capaian reformasi birokrasi pertahanan. Dengan demikian, hasil ini memperlihatkan bahwa peningkatan kinerja reformasi birokrasi pertahanan sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional yang berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI (Lekkas & Souitaris, 2023).

Tabel 7. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

Variable	Saturated Model	Estimated Model
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)	0.124	0.124

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil pengujian *Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)* menunjukkan nilai sebesar 0,124 baik pada *Saturated Model* maupun *Estimated Model*. Nilai ini sedikit lebih tinggi dari ambang batas yang direkomendasikan, yaitu 0,08–0,10, sehingga dapat diartikan bahwa model penelitian ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria *goodness of fit* secara ideal. Meskipun demikian, nilai SRMR tersebut masih berada dalam kategori mendekati batas toleransi model fit, yang berarti model secara keseluruhan tetap dapat diterima dan masih mampu menggambarkan hubungan antarvariabel secara representatif.

Dalam konteks penelitian tentang pengaruh *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* terhadap capaian reformasi birokrasi pertahanan, hasil ini menunjukkan bahwa struktur hubungan antarvariabel yakni kebijakan reformasi birokrasi, kapasitas aparatur, dan capaian indeks reformasi pertahanan secara umum telah menggambarkan data empiris dengan baik, meskipun masih terdapat sedikit deviasi yang mungkin berasal dari kompleksitas hubungan antarindikator dalam model (Gedeona & Trilestari, 2021).

Table 8. Cross-validated predictive ability test (CVPAT)

Variable	PLS loss	IA loss	Average loss difference	t value	p value
Capacity of Civil Servants and Military Person	0.295	0.303	-0.008	1.149	0.252
Reform Index of Defense Sector	0.295	0.303	-0.008	1.152	0.251

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil *Cross-Validated Predictive Ability Test (CVPAT)* menunjukkan bahwa nilai *average loss difference* sebesar -0.008 dengan *t-value* sekitar 1.15 dan *p-value* di atas 0.05 untuk kedua variabel, yaitu *Capacity of Civil Servants and Military Personnel* serta *Reform Index of Defense Sector*. Nilai tersebut menandakan bahwa model *Partial Least Squares (PLS)* memiliki stabilitas prediktif yang baik, meskipun kekuatan prediksinya tidak signifikan secara statistik.

Berdasarkan indikator uji *PLS Predict*, model dapat dikatakan memiliki kemampuan prediksi yang memadai jika *Root Mean Squared Error (RMSE)* atau *Mean Absolute Error (MAE)* model PLS lebih rendah daripada model regresi linier. Dalam konteks penelitian ini, hasil CVPAT dengan *average loss difference* yang negatif menandakan bahwa model PLS memiliki daya prediksi yang sedikit lebih baik dibandingkan model pembandingan, sehingga model penelitian dapat diandalkan untuk memprediksi hubungan antara kebijakan *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional*, kapasitas aparatur pertahanan, dan capaian indeks reformasi birokrasi. Dengan demikian, meskipun perbedaannya tidak signifikan, model tetap menunjukkan konsistensi dan keandalan dalam menggambarkan hubungan empiris antarvariabel dalam konteks (Sartor & Beamish, 2020)

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan implementasi *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di sektor pertahanan. Hasil uji model empiris menunjukkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan prajurit TNI, yang pada gilirannya memiliki pengaruh dominan terhadap capaian reformasi birokrasi pertahanan. Hal ini menegaskan bahwa dimensi manusia menjadi inti keberhasilan transformasi birokrasi di lingkungan pertahanan, di mana profesionalisme, kompetensi teknis, integritas, dan kemampuan adaptif aparatur merupakan faktor strategis yang menentukan efektivitas kebijakan reformasi (Gazalin & Asiri, 2022).

Namun demikian, hubungan langsung antara kebijakan *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* dan capaian reformasi birokrasi pertahanan tidak signifikan, yang mengindikasikan adanya

ketidaksesuaian antara indikator reformasi birokrasi nasional dan karakteristik birokrasi pertahanan. Standar evaluasi reformasi birokrasi nasional yang bersifat generik berfokus pada delapan area perubahan seperti tata laksana, akuntabilitas, dan pelayanan publik tidak sepenuhnya relevan dengan kompleksitas fungsi pertahanan yang bersifat strategis, hierarkis, dan berorientasi keamanan nasional. Ketidaksesuaian ini mendukung *Contingency Theory of Public Management* (Donaldson, 2001), yang menegaskan bahwa efektivitas organisasi publik ditentukan oleh kesesuaian antara struktur organisasi, fungsi kelembagaan, dan konteks operasionalnya (Suprayitno & Abbas, 2024).

Dari perspektif teoretis, hasil ini juga dapat dijelaskan melalui *Institutional Theory* (DiMaggio & Powell, 1983), di mana tekanan untuk menyeragamkan kebijakan birokrasi sipil ke dalam lembaga pertahanan menciptakan bentuk *coercive isomorphism* yang justru mengurangi fleksibilitas dan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan diferensiasi indikator reformasi birokrasi untuk sektor pertahanan yang mempertimbangkan konteks strategisnya, termasuk kesiapsiagaan operasional, efisiensi logistik pertahanan, interoperabilitas sistem komando, dan keamanan informasi (Pors & Pallesen, 2021).

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi kebijakan penting bagi Kementerian Pertahanan dan Kementerian PANRB untuk melakukan reformulasi indikator reformasi birokrasi sektor pertahanan agar lebih kontekstual dan fungsional. Diperlukan penguatan kebijakan berbasis *human capital development* serta adopsi sistem evaluasi yang menggabungkan efisiensi administratif dan efektivitas strategis pertahanan. Dengan demikian, reformasi birokrasi pertahanan tidak hanya selaras dengan prinsip *good governance*, tetapi juga mampu menjawab tantangan aktual keamanan nasional dan tuntutan profesionalisme militer di era modern (Mustafa et al., 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional* memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan prajurit TNI, yang selanjutnya berdampak kuat terhadap capaian reformasi birokrasi pada aspek pertahanan. Keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang profesional, kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan sistem tata kelola pertahanan. Pengaruh langsung kebijakan *Grand Design* terhadap capaian reformasi birokrasi pertahanan tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi nasional masih perlu disesuaikan dengan karakteristik birokrasi pertahanan yang bersifat strategis, hierarkis, dan berorientasi pada keamanan nasional.

Capaian reformasi birokrasi tersebut harus juga didukung dengan pendekatan kebijakan yang kontekstual” artinya indikator reformasi birokrasi yang dirancang dan diterapkan di kementerian pertahanan jangan sama dengan indikator reformasi birokrasi yang bersifat umum tetapi perlu mempertimbangkan karakteristik, fungsi, dan kebutuhan spesifik dari sektor atau institusi yang menjadi objeknya dalam hal ini sektor pertahanan negara. Pendekatan kontekstual menekankan bahwa reformasi birokrasi pertahanan tidak dapat menggunakan standar yang sama dengan instansi sipil karena sektor pertahanan memiliki orientasi strategis, hierarkis, dan berfokus pada keamanan nasional. Indikator dan strategi reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan dan TNI harus menyesuaikan dengan konteks operasional militer seperti efektivitas dan efisiensi rantai komando, kesiapsiagaan operasional, dan keamanan informasi bukan hanya efisiensi administratif atau pelayanan publik seperti di lembaga sipil. Pendekatan ini sejalan dengan Contingency Theory of Public Management yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik hanya dapat dicapai jika struktur dan instrumen kebijakan disesuaikan dengan konteks lingkungan dan karakteristik organisasi.

Kontribusi utama penelitian ini menegaskan urgensi penerapan reformasi birokrasi berbasis konteks di sektor pertahanan, di mana indikator dan strategi reformasi tidak dapat diseragamkan dengan sektor sipil karena perbedaan karakteristik kelembagaan, fungsi strategis, dan orientasi keamanan nasional. Sejalan dengan Contingency Theory of Public Management, efektivitas kebijakan publik hanya dapat dicapai jika struktur, instrumen, dan indikator kebijakan disesuaikan dengan konteks operasional organisasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan dan TNI perlu dirancang dengan pendekatan kebijakan yang kontekstual, yang mempertimbangkan karakteristik sistem komando militer, efisiensi pengambilan keputusan, kesiapsiagaan operasional, serta keamanan informasi.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisis yang masih berfokus pada variabel kapasitas aparatur sipil negara dan prajurit TNI sebagai faktor mediasi tunggal, tanpa mempertimbangkan variabel lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan strategis, atau dukungan teknologi informasi yang juga berpotensi memengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi pertahanan.

Saran bagi penelitian ke depan, disarankan agar dilakukan pendekatan mixed methods dengan menambahkan analisis kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas reformasi birokrasi di sektor pertahanan. Penelitian selanjutnya juga perlu mengembangkan model reformasi birokrasi adaptif yang

Faonaso Harefa, Yaya Mulyana Aziz, Teddy Hikmat Fauzi. Determinasi Politik Terhadap Kinerja Reformasi Birokrasi Di Kementerian Pertahanan: Kompetensi Sdm, Tata Kelola, Dan Desain Reformasi Kontekstual, JSIPOL, Vol 5 Issue 1 No. 1, 31 Januari 2026

memasukkan variabel kesiapsiagaan organisasi, kepemimpinan militer, serta integrasi sistem digital pertahanan agar hasilnya lebih aplikatif bagi perumusan kebijakan nasional.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA:

- Adiananto, Y., Widjajani, R., & Sholahuddin, A. (2024). Implementation of Integrity Zones towards Clean Bureaucracy in the Lamandau State. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 05(02), 01–08. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2024.2.1>
- Afifi, A. A., & Abbas, A. F. (2023). Worldview Islam dalam Aktualisasi Moderasi Beragama yang Berkemajuan di Era Disrupsi Digital. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 4(August 2023), 23–34. <https://doi.org/10.58764/j.im.2023.4.31>
- Ayugo, A., & Septiana, A. M. (2021). *Implementation Of Regulation Of The Minister Of Administrative Reform And Bureaucratic Reform Of The Republic Of Indonesia Number 90 Of 2021 For The Development Of The Police Public Service Integrity Zone Towards A Corruption-Free Area And A Clean Serving*. 90, 161–183.
- Bauwens, R., & Meyfroodt, K. (2021). Debate: Towards a more comprehensive understanding of ritualized bureaucracy in digitalized public organizations. *Public Money and Management*, 41(4), 281–282. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1884349>
- Budi, B. S., & Wahyudi, R. (2024). *FACTORS AFFECTING THE ACHIEVEMENT OF THE INTEGRITY ZONE PREDICATE FOR A CLEAN AND SERVING BUREAUCRACY (WBBM) IN THE OFFICE OF THE PEKANBARU CITY LAND AGENCY*. 2(2), 54–61.
- Chauhan, R. (2022). Does Online Shopping Affect Price and Quality Negotiation of Youngsters? A PLS-SEM View. *International Journal of Finance, Insurance and Risk Management*, 12(Issue 3), 46–57. <https://doi.org/10.35808/ijfirm/323>
- Clement, J., Esposito, G., & Crutzen, N. (2023). Municipal Pathways in Response to COVID-19: A Strategic Management Perspective on Local Public Administration Resilience. *Administration and Society*, 55(1), 3–29. <https://doi.org/10.1177/00953997221100382>
- Gazalin, J., & Asiri, L. (2022). Implementasi Good dan Clean Governance dengan Pendekatan Nilai-Nilai Po- Lima pada Pemerintahan Kota Baubau Junaid. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1), 3059–3070.
- Gedeona, H. T., & Trilestari, E. W. (2021). The Model for Implementing Bureaucratic Reform in the Ministry of Administrative Reform. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 564(Icas 2020), 146–155. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.028>
- Guenther, P., Guenther, M., Ringle, C. M., Zaefarian, G., & Cartwright, S. (2023). Improving PLS-SEM use for business marketing research. *Industrial Marketing Management*, 111(April), 127–142. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2023.03.010>
- Lapuente, V., & Van de Walle, S. (2020). The effects of new public management on the quality of public services. *Governance*, 33(3), 461–475. <https://doi.org/10.1111/gove.12502>
- Legate, A. E., Hair, J. F., Chretien, J. L., & Risher, J. J. (2023). PLS-SEM: Prediction-oriented solutions for HRD researchers. *Human Resource Development Quarterly*, 34(1), 91–109.

<https://doi.org/10.1002/hrdq.21466>

- Lekkas, C. K., & Souitaris, V. (2023). Bureaucracy Meets Digital Reality: The unfolding of urban platforms in European municipal governments. *Organization Studies*, 44(10), 1649–1678. <https://doi.org/10.1177/01708406221130857>
- Lesmana, D., Rosadi, B., Hermana, D., Liu, R., & Winarno, A. (2022). Analyzing the Effect of Bureaucratic Leadership on Public Service Motivation and Job Performance. *Journal of Local Government Issues*, 5(2), 114–127. <https://doi.org/10.22219/logos.v5i2.20904>
- Macro, T., Policies, S., Saydi, F., Mosakhani, M., Esfehiani, S. T., & Tayaran, S. (2023). *Conceptualization and Application of the Clean Government : Towards the Realization of the* □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □ □□□□ 354), 2(11. □□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□–383.
- Melin, U., Madsen, C. Ø., & Larsson, K. K. (2024). Five Bureaucratic Roles in the Age of Digital Transformation – Insights from Scandinavian Public Organizations. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 14841 LNCS, 99–115. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70274-7_7
- Mustafa, G., Solli-Sæther, H., Bodolica, V., Håvold, J. I., & Ilyas, A. (2022). Digitalization trends and organizational structure: bureaucracy, ambidexterity or post-bureaucracy? *Eurasian Business Review*, 12(4), 671–694. <https://doi.org/10.1007/s40821-021-00196-8>
- Oliveira, E., Abner, G., Lee, S., Suzuki, K., Hur, H., & Perry, J. L. (2024). What does the evidence tell us about merit principles and government performance? *Public Administration*, 102(2), 668–690. <https://doi.org/10.1111/padm.12945>
- Pors, A. S., & Pallesen, E. (2021). The reorganization of the bureaucratic encounter in a digitized public administration. *Ephemera: Theory & Politics in Organization*, 21(3), 17–47. www.ephemerajournal.org
- Ramadhan, N. H., Isbandono, P., Prastyawan, A., & Rahayu, E. P. (2022). Bureaucratic Reform in an Era of Uncertainty and Change: Relinquish the Bureaucratic Polity Model by Evolving Governance. *KnE Social Sciences*, 2022, 980–1002. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10993>
- Saputra, D. H., Muhlis, L. P., Ilmy, M., Suparno, A., Nasuhi, M., & Mufidah, M. (2021). Implementation of Good Governance and Clean Governance Towards an Effective and Dignity Bureaucracy. *PINISI Discretion Review*, 4(2), 327. <https://doi.org/10.26858/pdr.v4i2.21491>
- Sartor, M. A., & Beamish, P. W. (2020). Private Sector Corruption, Public Sector Corruption and the Organizational Structure of Foreign Subsidiaries. *Journal of Business Ethics*, 167(4), 725–744. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04148-1>
- Suprayitno, N. F., & Abbas, S. A. (2024). Bureaucratic Transformation in Indonesia: An In-Depth Analysis from the Perspective of Public Administration. *Mandat: Journal of Politics, Government, and Public Administration*, 1(1), 34–51.
- Tang, Z., Zhou, Z., & Warkentin, M. (2022). A contextualized comprehensive action determination model for predicting consumer electronics recommerce platform usage: A sequential mixed-methods approach. *Information and Management*, 59(3), 0–45. <https://doi.org/10.1016/j.im.2022.103617>
- Tiwisia, V., Setiawan, A. W., & Triono, A. (2020). Bureaucratic Reform of Indonesia Attorney:

Faonaso Harefa, Yaya Mulyana Aziz, Teddy Hikmat Fauzi. Determinasi Politik Terhadap Kinerja Reformasi Birokrasi Di Kementerian Pertahanan: Kompetensi Sdm, Tata Kelola, Dan Desain Reformasi Kontekstual, JSIPOL, Vol 5 Issue 1 No. 1, 31 Januari 2026

- Building Integrity of Law Enforcement and Improving Public Trust. *International Journal of Humanities and Social Science*, 10(6), 125–131. <https://doi.org/10.30845/ijhss.v10n6a15>
- Umar, Setyosari, P., Kamdi, W., & Sulton. (2021). Exploration of moral integrity education and superior cadre leadership at madrasah boarding school indonesia. *International Journal of Instruction*, 14(4), 753–774. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14443a>
- Vuković, M. (2024). CB-SEM vs PLS-SEM comparison in estimating the predictors of investment intention. *Croatian Operational Research Review*, 15(2), 131–144. <https://doi.org/10.17535/crorr.2024.0011>
- Williams, M. J. (2021). Beyond state capacity: Bureaucratic performance, policy implementation and reform. *Journal of Institutional Economics*, 17(2), 339–357. <https://doi.org/10.1017/S1744137420000478>
- Yang, Q., Al Mamun, A., Hayat, N., Jingzu, G., Hoque, M. E., & Salameh, A. A. (2022). Modeling the Intention and Adoption of Wearable Fitness Devices: A Study Using SEM-PLS Analysis. *Frontiers in Public Health*, 10(July), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.918989>
- Yudha Bramantyo, R., & Yuliasuti, N. (2022). Bureaucracy Reform for Improving Good Governance Through One Stop Service. *Journal of Positive School Psychology*, 2022(6), 655–664. <http://journalppw.com>
- Yusuf, M. S. A., Man, N., Haris, N. B. M., Ismail, I. A., Yee, S. S., & Abu Bakar, T. H. S. T. (2024). Improvement Model Framework of Urban Agriculture Program in Malaysia: PLS-SEM Analysis. *Sarhad Journal of Agriculture*, 40(1), 171–186. <https://doi.org/10.17582/journal.sja/2024/40.1.171.186>

KOALISI PARTAI POLITIK DALAM MENGUSUNG CALON TUNGGAL DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

Yessica Aulia Putri Hidayat¹, Aidinil Zetra², Zulfadli³

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas¹²³

E-mail Coresponden : yessicaaulia812@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pembentukan koalisi partai politik dalam mengusung calon tunggal di Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Koalisi partai politik pengusung calon tunggal yang terdiri dari 9 partai politik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pembentukan koalisi partai politik dalam pengusungan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori pembentukan koalisi partai politik menurut Arend Lijphart, yang terbagi ke dalam 5 jenis pembentukan koalisi partai politik yaitu *Minimal Winning Coalitions*, *Minimum Size Coalitions*, *Bargaining Propositions*, *Minimal Range Coalitions* dan *Minimal Connected Winning Coalitions*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Koalisi partai politik dalam Pilkada Dharmasraya 2024 bersifat gemuk dan pragmatis, dibentuk untuk memastikan kemenangan calon tunggal, bukan untuk efisiensi kekuasaan. Kedua, proses pembentukan koalisi tidak melalui proses tawar menawar politik (*bargaining*), karena keputusan sepenuhnya ditentukan oleh DPP partai. Ketiga, kesamaan ideologi antar partai tidak menjadi dasar pembentukan koalisi, penyatuan lebih didorong oleh kepentingan strategis untuk memenangkan calon. Keempat, keterhubungan partai bersifat pragmatis dan personalistik, berfokus pada dukungan terhadap figur Annisa Suci sebagai simbol kesinambungan kekuasaan lokal. Kelima, dominasi elit pusat melemahkan demokrasi lokal, menunjukkan bahwa politik daerah masih dikendalikan oleh struktur elit pusat.

Kata Kunci: *Koalisi Partai Politik, Calon Tunggal, Pilkada*

ABSTRACT

This study discusses about the formation of political party coalitions in supporting a single candidate in the 2024 Dharmasraya Regency Election. The political party coalition supporting the single candidate consists of nine political parties. The purpose of this study is to analyze the formation of political party coalitions in supporting a single candidate in the 2024 Dharmasraya Regency Election. This study uses Arend Lijphart's theory of political party coalition formation, which is divided into five types of political party coalition formation, namely Minimal Winning Coalitions, Minimum Size Coalitions, Bargaining Propositions, Minimal Range Coalitions, and Minimal Connected Winning Coalitions. The method used in this study is a qualitative approach with a case study method. The results of this study show that: First, the political party coalition in the 2024 Dharmasraya Regional Election is large and pragmatic, formed to ensure the victory of the single candidate, not for the efficiency of power. Second, the coalition formation process did not go through a political bargaining process, as the decision was entirely determined by the party's central leadership. Third, ideological similarities between parties were not the basis for coalition formation; unification was driven more by strategic interests to win the election. Fourth, party connections were pragmatic and personalistic, focusing on support for Annisa Suci as a symbol of local power continuity. Fifth, the dominance of the central elite weakened local democracy, indicating that regional politics was still controlled by the central elite structure.

Keyword : *Political Party Coalition, Single Candidate, Regional Elections*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana demokrasi lokal yang memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Pada Pilkada serentak 27 November 2024, tercatat 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota turut berpartisipasi. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah yang turut berpartisipasi, dengan 19 kabupaten/kota yang ambil bagian dalam proses elektoral tersebut. Salah satu fenomena yang kembali muncul adalah hadirnya pasangan calon tunggal, yang terjadi di 1 Provinsi, 5 kota, dan 31 kabupaten, termasuk Kabupaten Dharmasraya yang berada di Provinsi Sumatera Barat.

Fenomena calon tunggal bukan hal baru dan telah terjadi sejak 2015, dengan trend peningkatan pada setiap periode. Munculnya calon tunggal umumnya disebabkan oleh sulitnya bakal calon memperoleh dukungan partai politik maupun tidak terpenuhinya syarat dukungan bagi calon independen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 semakin memantapkan legalitas penyelenggaraan pilkada meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Kecenderungan munculnya calon tunggal tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, seperti tidak terpenuhinya syarat dukungan partai politik bagi bakal calon, kesulitan dalam memperoleh dukungan, hingga konfigurasi kekuatan politik yang terlalu dominan pada satu poros koalisi.

Dalam konteks Dharmasraya Tahun 2024, hanya satu pasangan calon Annisa Suci Ramadani dan Leli Arni yang akhirnya maju, setelah sebelumnya terdapat dua bakal pasangan calon yang rencana akan bertarung. Kondisi ini dipengaruhi mekanisme pencalonan dan verifikasi yang menyebabkan hanya satu paslon yang memenuhi syarat. Pasangan ini diusung oleh sembilan partai politik pemilik kursi di DPRD, sehingga hal tersebut menciptakan koalisi yang sangat besar (*oversize coalitions*). Dominasi politik tersebut membuat tidak ada partai tersisa yang dapat memenuhi ambang batas 20% kursi DPRD untuk mengusung calon alternatif.

Konstestasi koalisi gemuk ini mencerminkan bagaimana kepentingan politik lokal dapat terpusat dan menyatu dalam satu poros kekuasaan. Hal ini tidak hanya mengeliminasi ruang bagi munculnya pasangan calon alternatif, tetapi juga memunculkan implikasi serius bagi kualitas demokrasi lokal. Ketiadaan oposisi membuat fungsi kontrol politik melemah, dan membuka potensi bagi dominasi elite lokal dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Dharmasraya, sembilan partai politik yang berkoalisi menguasai lebih dari 90% kursi DPRD. Sementara itu, satu partai yang tersisa tidak memenuhi ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, secara struktural tidak tersedia ruang politik bagi hadirnya pesaing lain.

Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon yang maju merupakan figur yang memiliki dukungan politik yang memadai. Namun, dalam praktiknya, aturan ini juga berpotensi menjadi hambatan bagi munculnya kompetisi elektoral yang sehat ketika seluruh partai politik memilih untuk berkoalisi dalam satu blok kekuatan. Kondisi inilah yang terlihat jelas pada Pilkada Dharmasraya tahun 2024.

Koalisi besar dalam Pilkada Dharmasraya tidak terbentuk berdasarkan kesamaan ideologi, tetapi lebih dipandu oleh kepentingan pragmatis untuk memenangkan kontestasi tanpa lawan. Pola ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian terdahulu di tingkat lokal maupun nasional, yang menunjukkan kecenderungan koalisi partai politik di Indonesia lebih bersifat pragmatis, office seeking, dan tidak didasarkan pada kesamaan kebijakan atau platform (policy blind coalition). Kondisi tersebut membuka potensi melemahnya kompetisi elektoral dan fungsi oposisi, serta menguatkan dominasi elite politik lokal.

Berdasarkan kondisi dan keadaan tersebut, penting untuk dilakukan kajian terkait bagaimana pembentukan koalisi dalam mengusung calon tunggal di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan koalisi partai politik dalam pengusungan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada pembentukan koalisi dari sembilan partai politik dalam mengusung satu pasangan calon tunggal di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024, dengan menelaah proses, motif serta dinamika politik yang melatarbelakangi koalisi gemuk dalam pemilihan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika pembentukan koalisi partai politik dalam mengusung calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik dipilih karena penelitian ini secara khusus bertujuan memahami bentuk dan dinamika koalisi sembilan partai politik yang mengusung satu pasangan calon pada Pilkada Dharmasraya Tahun 2024. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan alasan bahwa penelitian ini berupaya menyajikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai pola koalisi partai politik serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan fenomena penelitian, sedangkan data sekunder dihimpun dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, peraturan, dokumen kebijakan, berita, dan literatur lainnya yang mendukung analisis penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

HASIL DAN DISKUSI

Pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 menunjukkan pola yang berbeda dari tipologi koalisi minimal menurut Arend Lijphart. Koalisi yang mengusung pasangan calon tunggal Annisa Suci Ramadani – Leli Arni justru melibatkan sembilan partai politik sekaligus, sehingga membentuk *oversized coalition* yang bersifat pragmatis. Temuan ini memperlihatkan bahwa koalisi dibangun bukan berdasarkan efisiensi jumlah partai, kedekatan ideologi, maupun proses tawar-menawar politik, tetapi dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, instruksi pusat, serta jaringan politik lokal.

Pertama, teori *Minimal Winning Coalition* dan *Minimum Size Coalition* tidak terkonfirmasi dalam kasus Dharmasraya. Meskipun syarat pencalonan hanya memerlukan 20% kursi DPRD, partai-partai tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi partai lain untuk bergabung. Tidak ada pembatasan jumlah partai, karena semakin banyak partai dianggap semakin memperkuat peluang kemenangan dan menutup kemungkinan munculnya lawan politik. Koalisi besar yang terbentuk lebih mencerminkan orientasi dominasi politik ketimbang efisiensi koalisi.

Kedua, proses pembentukan koalisi tidak menunjukkan adanya *bargaining proposition* di tingkat lokal. Keputusan pencalonan sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sementara kader di daerah hanya mengikuti instruksi. Negosiasi yang terjadi hanya bersifat teknis (pembagian tugas pemenangan), bukan tawar-menawar substantif terkait calon maupun pembagian kekuasaan. Hal ini mengonfirmasi karakter sentralistik partai politik dalam penentuan calon kepala daerah.

Gambar 5. 1

Surat Keputusan DPP Partai PPP tentang Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



Sumber : Data sekunder, diperoleh dari pengurus partai politik ppp

Ketiga, teori *Minimal Range Coalition* juga tidak sejalan dengan temuan lapangan. Koalisi yang terbentuk berisi partai-partai dengan orientasi ideologis berbeda: nasionalis, nasionalis-populis, Islam tradisional, dan Islam modernis. Perbedaan ideologi tidak menjadi hambatan, karena semua partai sepakat mengesampingkan identitas ideologis demi tujuan pragmatis memenangkan calon tunggal. Kesamaan ideologi tidak menjadi dasar koalisi; faktor strategis dan kepentingan elektoral jauh lebih dominan.

Keempat, dinamika koalisi lebih mendekati karakter *Minimal Connected Winning Coalition*, tetapi keterhubungan antarpolisi bukan karena kedekatan ideologi, melainkan karena hubungan personal antar-elite serta legitimasi figur calon. Pengaruh genealogis Annisa sebagai putri dari mantan Bupati pertama Dharmasraya, Marlon, menjadi faktor penting dalam memudahkan komunikasi lintas partai. Hubungan sosial dan jaringan politik yang telah lama terbangun antara Marlon, elite partai, dan tokoh lokal menjadi penghubung yang mengonsolidasikan koalisi secara pragmatis.

Tabel 1.1

Daftar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2004			
No	Nama Bupati	Nama Wakil Bupati	Periode Jabatan
1.	Marlon Martua Situmeang	Tugimin	2005 - 2010
2.	Adi Gunawan	Syafruddin R.	2010 – 2015
3.	Sutan Riska Tuanku Kerajaan	Amrizal Dt. Rajo Medan	2016 - 2021
4.	Sutan Riska Tuanku Kerajaan	Dasril Panin Datuk Labuan	2021 - 2025
5.	Annisa Suci Ramadhani	Leli Arni	2025 - 2030

Sumber : Data diolah peneliti

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya peran dominan aktor oligarkis lokal. Marlon berperan sebagai *kingmaker* yang memfasilitasi komunikasi, membentuk konsensus tidak tertulis antarpolisi, dan memastikan tidak ada calon alternatif yang muncul. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan lokal dapat memengaruhi arah keputusan partai serta menciptakan kondisi calon tunggal. Secara keseluruhan, pembentukan koalisi dalam Pilkada Dharmasraya Tahun 2024 merupakan koalisi besar yang pragmatis, tidak dibangun berdasarkan pertimbangan ideologi atau efisiensi sebagaimana teori Lijphart. Koalisi ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan yang didorong oleh instruksi pusat, pragmatisme elektoral, serta pengaruh oligarki lokal, sehingga menghasilkan skenario calon tunggal melalui eliminasi peluang munculnya kompetitor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data lapangan, dapat disimpulkan bahwa dinamika pembentukan koalisi di Dharmasraya menunjukkan karakter yang berbeda dari tipologi koalisi yang

dijelaskan Lijphart. Koalisi partai politik yang mengusung pasangan Annisa Suci Ramadhani–Leli Arni tidak terbentuk berdasarkan efisiensi kekuasaan, kesamaan ideologi, ataupun proses tawar-menawar antarpolisi, melainkan lebih didorong oleh kepentingan pragmatis dan dominasi keputusan dari elit pusat (DPP).

Koalisi yang terbentuk bersifat gemuk dan pragmatis, bukan efisien. Alih-alih membentuk *Minimal Winning Coalition* atau *Minimum Size Coalition* sebagaimana teori Lijphart, partai-partai di Dharmasraya justru membangun koalisi besar yang melibatkan sembilan partai politik. Strategi ini bertujuan untuk mengamankan kemenangan dan menutup peluang munculnya lawan politik. Artinya, efisiensi jumlah partai tidak menjadi pertimbangan utama, karena tujuan koalisi lebih diarahkan pada penguasaan total atas arena politik lokal.

Tidak terdapat proses tawar menawar politik (Bargaining Proposition) di tingkat lokal. Keputusan untuk mendukung pasangan calon tunggal sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai. Kader partai di daerah tidak memiliki ruang negosiasi untuk menentukan arah dukungan. Hal ini menandakan kuatnya sentralisasi dalam tubuh partai politik dan lemahnya demokrasi internal, di mana struktur pusat memiliki kontrol penuh terhadap keputusan politik di daerah.

Kesamaan ideologi antar partai bukan menjadi dasar pembentukan koalisi. Dalam konteks teori *Minimal Range Coalition*, idealnya partai berkoalisi dengan partai yang memiliki kedekatan ideologis. Namun, di Dharmasraya, koalisi terbentuk antara partai-partai dengan ideologi berbeda (Nasionalis, Islam, dan Populis) tanpa mempermasalahkan perbedaan tersebut. Faktor utama penyatuan koalisi adalah kepentingan strategis untuk memenangkan pasangan calon tunggal, bukan karena kesamaan nilai politik atau orientasi ideologis.

Keterhubungan antar partai bersifat pragmatis, bukan ideologis. Jika dalam teori *Minimal Connected Winning Coalition* keterhubungan dibangun melalui kesamaan nilai atau orientasi politik, maka dalam kasus Dharmasraya keterhubungan yang terjadi bersifat personalistik. Partai-partai terhubung karena sama-sama memiliki kepentingan untuk mendukung figur Annisa Suci Ramadhani, yang memiliki legitimasi genealogis sebagai putri dari mantan Bupati pertama Dharmasraya. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas partai lebih berorientasi pada figur calon daripada pada visi politik bersama.

Dominasi elit pusat memperkuat pola politik sentralistik dan melemahkan demokrasi lokal. Pembentukan koalisi di tingkat daerah tidak mencerminkan kemandirian politik lokal, melainkan memperlihatkan struktur politik vertikal di mana keputusan diambil oleh elit partai di pusat. Dominasi DPP dalam menentukan arah koalisi menunjukkan bahwa politik lokal di

Dharmasraya masih berada dalam kendali oligarki partai dan belum sepenuhnya mencerminkan praktik demokrasi yang partisipatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa teori Lijphart belum mampu untuk menjelaskan jenis koalisi yang terbentuk dalam Pilkada Kabupaten Dharmasraya, sehingga peneliti merumuskan untuk mendukung hasil penelitian itu dengan teori *office-seeking* menurut Riker, yaitu bahwa partai politik membentuk koalisi bukan karena kesamaan ideologi atau kepentingan kebijakan, tetapi karena ingin untuk memaksimalkan peluang memperoleh jabatan dan sumber daya politik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 bersifat pragmatis, elitis, dan sentralistik. Koalisi besar yang terbentuk bukanlah hasil dari rasionalitas politik sebagaimana dijelaskan Lijphart, tetapi merupakan strategi kekuasaan untuk memastikan kemenangan tanpa kompetitor.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Rainer, (2010), *Masa Depan Ada di Tengah: Toolbox Manajemen Koalisi*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2010
- Adhi & Ahmad. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang.
- Altman, David. (2000). *The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999, Party Politics*, Vol. 6 No. 3
- Amal, Ichlasul. (1996) *Teori-teori Mutakhir Partai Politik (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Antaraneews.com. (2018). *Mantan Bupati Dharmasraya Terlibat Kasus Korupsi RSUD Sungai Dareh*.
- Armadhani, D. (2022). *Kepentingan Partai Pengusung Calon Tunggal Benny Utama – Sabar AS pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020*. *Scholar.Unand.Ac.Id*.
- Creswell, J.W.(2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DPD Partai Golkar Sumatera Barat. (2023). *Laporan Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat*. Padang: DPD Partai Golkar Sumbar.
- DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat. (2023). *Laporan Tahunan DPW PKS Sumatera Barat Tahun 2023: Kolaborasi Politik Berkeadaban*. Padang: DPW PKS Sumbar.
- Dr. Wahidmurni, M. P. (2018). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*. *Research Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.

- Yessica Aulia Putri Hidayat, Aidinil Zetra, Zulfadli, *Koalisi Partai Politik Dalam Mengusung Calon Tunggal Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, JSIPOL, Vol 5 Issue 1 No. 2, 31 Januari 2026*
- Ekawati, E. (2019). Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 160.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16-37.
- Fadillah, N. (2024). *Inilah Daftar 21 Paslon Yang Sudah Daftar Pilkada Sumbar di 15 Kabupaten/Kota*. SumbarKita.
- Feny R.F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Firdaus, K. (2020). *Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai*. CV. Pilar Nusantara
- Heywood, Andrew. (2000) *Key Concept in Politics*, New York: Palgrave Macmillan.
- Hidayat, R. (2021). Koalisi partai politik dan dinamika kesamaan ideologi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 11(2), 167–182.
- Karam, A., Lovenduski, J., Ballington, J., & Dahlerup, D. (2002). Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah. In *International IDEA*.
- Kesekretariatan Daerah Kabupaten Dharmasraya, “Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022” (Dharmasraya: Pemerintah Daerah Dharmasraya, 2022).
- Khairiyah, & Rahmadi, D. (2021). Mekanisme penentuan koalisi partai politik pengusung calon tunggal bupati dan wakil bupati benny utama-sabar as melawan kotak kosong pada pilkada serentak 2020 di kabupaten pasaman. *Menara Ilmu*, XV(02), 22–34.
- Khodijah, S., & Subekti, V. S. (2020). Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 177–187.
- Kodiyat, R. (2020). Sentralisasi kekuasaan partai politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 12(1), 55–68.
- Kurniawan, D. (2024). Analisis Kegagalan Fungsi Kaderisasi Dan Rekrutmen Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Di Pilkada Pasaman Tahun 2020. Universitas Andalas. *Skripsi*
- Lijphart Arend (1997). *Patterns of government formation in parliamentary democracies*. Yale University Press.
- Maaratong, J. (2019). Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Politico*, 8(4), 1–22.
- Makhasin, L. (2016). Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(3), 234.

Yessica Aulia Putri Hidayat, Aidinil Zetra, Zulfadli, Koalisi Partai Politik Dalam Mengusung Calon Tunggal Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, JSIPOL, Vol 5 Issue 1 No. 2, 31 Januari 2026

Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Perdana Putra, K. (2024). *Ditetapkan KPU, Annisa-Leli Lawan Kotak Kosong di Pilkada Dharmasraya*. Kompas.Com.

Prima, A. (2024). *Daftar Provinsi, Kota/Kabupaten yang Menggelar Pilkada Serentak 2024*. PEMILUPEDIA.

Raco, J (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwani Diaz. (2022). "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 19.1: 47-72.

Redaksi, T. (2024). *9 Parpol Daftarkan Pasangan ASLI Calon Bupati Dharmasraya Periode 2024-2029 Ke KPU*. ProKabar.Com.

Riwanto, A. (2024). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2).

Riker, W. H. (1962). *The theory of political coalitions*. Yale University Press

Rizki Ramadhani, S.H., M.H, Rizki Maharani, S.IP., M. Ip. (2022). *Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi*. Penerbit Adab. Penerbit Adab

Rosanti, Ratna. (2020) "Political Pragmatics in Indonesia: Candidates, the Coalition of Political Parties and Single Candidate for Local Elections." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 12, No. 2

Nurmandi dan Sari. (2020). Konsolidasi internal partai politik dalam pilkada serentak: Studi terhadap mekanisme penentuan calon kepala daerah. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3), 321–338

Sejarah Kabupaten Dharmasraya, diakses melalui website resmi Kabupaten Dharmasraya

Setiawan (2022). Disiplin partai dan keseragaman arah dukungan dalam pilkada serentak di Indonesia. *Jurnal Politik Lokal*, 9(1), 45–61.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung

Sumbar.antaranews.com. (2023). *Bupati: Penggalan Sejarah Dharmasraya untuk Penyemangat Daerah Lebih Maju*.

Tempo, A. (2024). *Cerita di Balik Keputusan PKS Alihkan Dukungan ke Annisa-Leli di Pilkada Dharmasraya*. Tempo Politik.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Yessica Aulia Putri Hidayat, Aidinil Zetra, Zulfadli, Koalisi Partai Politik Dalam Mengusung Calon Tunggal Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, JSIPOL, Vol 5 Issue 1 No. 2, 31 Januari 2026

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang No.38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (1) tentang Partai Politik

Wahid, R. (2021). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pilkada di Daerah: *Studi atas Interaksi Antar-Elite Politik Lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal Indonesia*, Vol. 4, No. 2, hlm. 80–92.

Wahidmurni, “*Pemaparan metode penelitian kualitatif*”, Repository: (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017:4)

Wibowo, T. A. B. (2022). Orientasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dan Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Pembentukan Koalisi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020. Universitas Andalas. *Skripsi*

Winasih, N. W. I., Erawan, I. K. P., & Bandiyah. (2016). Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi (Studi Kasus: Pilkada Serentak di Kabupaten Karangasem dan Tabanan 2015). *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–17.

Yuda, H. (2010). *Koalisi Partai Politik: Rasionalitas, Arah, dan Masa Depan*. Jakarta: Grafindo Persada.

STRATEGI PARTAI GOLKAR DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU JAWA BARAT 2024

Satryo Putra Pratama¹, Elsyam Alfarisi², Yanuar Alfiansyah³, Muhammad Andi Septiadi⁴

UIN Sunan Gunung Djati¹²³⁴

E-mail Coresponden : satryoprata51@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the masalah rendahnya perolehan suara Partai Golkar di Pemilu sebelumnya di Jawa Barat, amidst the post-reform transformation that demands innovative political communication strategies for the 2024 election, particularly facing the intense competition from Gerindra and PKS. The main objective is to explore defensive strategies (internal cadre consolidation, loyalty of the mass base through central-regional coordination) and offensive strategies (expanding support via Instagram social media, agenda setting on issues of economic development, political stability, MSME empowerment, and cadre experience), to understand the factors behind achieving the top position. The method applied is qualitative descriptive, using in-depth interviews with DPD Golkar West Java officials (Informan H. Kusnadi and Gunawan), campaign observations, social media content analysis, KPU data, and Rogers & Dearing's agenda setting theory, processed through Miles & Huberman's data reduction, presentation, verification, and source-method triangulation. The results show that Golkar obtained 4,292,082 votes (16.33%) in the West Java DPR RI and 3,590,621 votes (15.83%, 19 seats) in the DPRD, driven by a positive image through mass media that subdued negative issues and pro-people programs, although criticized as manipulative. The conclusion is that the integrated strategy is effective but needs authenticity on the ground for sustainability. The contribution includes an electoral benchmark based on data technology for other parties, political education for West Java society, and enrichment of political science in Indonesia.

Keyword: Strategy, Golkar Party, 2024 Election, West Java.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis masalah rendahnya perolehan suara Partai Golkar di Pemilu sebelumnya di Jawa Barat, di tengah transformasi pasca-reformasi yang menuntut strategi komunikasi politik inovatif untuk Pemilu 2024, khususnya menghadapi kompetisi ketat dari Gerindra dan PKS. Tujuan utama adalah mendalami strategi defensif (konsolidasi internal kader, loyalitas basis massa melalui koordinasi pusat-daerah) dan ofensif (ekspansi dukungan via media sosial Instagram, agenda setting pada isu pembangunan ekonomi, stabilitas politik, pemberdayaan UMKM, serta pengalaman kader), guna memahami faktor pencapaian posisi teratas. Metode kualitatif deskriptif diterapkan dengan wawancara mendalam pengurus DPD Golkar Jawa Barat (Informan H. Kusnadi dan Gunawan), observasi kampanye, analisis konten media sosial, data KPU, serta teori agenda setting Rogers & Dearing, diolah melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi Miles & Huberman dengan triangulasi sumber-metode. Hasil menunjukkan Golkar meraih 4.292.082 suara (16,33%) di DPR RI Jawa Barat dan 3.590.621 suara (15,83%, 19 kursi) di DPRD, didorong citra positif melalui media massa yang meredam isu negatif serta program pro-rakyat, meski dikritik manipulatif. Strategi terintegrasi efektif, tapi perlu autentisitas lapangan untuk keberlanjutan. Kontribusi: tolak ukur elektoral berbasis data-teknologi bagi partai lain, pendidikan politik masyarakat Jawa Barat, dan pengayaan ilmu politik Indonesia.

Kata Kunci: Strategi, Partai Golkar, Pemilu 2024, Jawa Barat.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi secara rutin menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan yang

diterapkan, partai politik berperan krusial sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah melalui proses pemilu (Ramadhan, 2021). Partai Golkar, salah satu partai politik terbesar di Indonesia, telah mengalami transformasi signifikan sejak era orde baru hingga masa reformasi, dan terus berupaya mempertahankan posisinya dalam kancah politik nasional (H. P. Sari & Galih, 2020). Menjelang Pemilu 2024, Golkar berkomitmen untuk meraih kemenangan di tingkat legislatif maupun eksekutif dengan mengimplementasikan dua strategi utama : defensif dan ofensif. Strategi defensif fokus pada mempertahankan basis dukungan yang sudah ada dengan memperkuat konsolidasi internal partai. Partai Golkar memaksimalkan koordinasi dan komunikasi antar pengurus dari pusat hingga daerah, memastikan seluruh kader solid dan bersatu. Konsolidasi ini juga melibatkan simpatisan, sayap partai, dan relawan guna menjaga loyalitas dan mencegah pergeseran dukungan ke partai lain.

Melalui pendekatan ini, Golkar berupaya menjaga pijakan politik yang telah di bangun sekaligus meminimalkan risiko perpecahan internal yang dapat melemahkan kekuatan partai. Sementara itu, strategi ofensif diarahkan untuk memperluas basis dukungan dengan melakukan pemetaan dan survey pemilihan potensial berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Golkar menggerakkan kader hingga tingkat akar rumput untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat, menyerap aspirasi dan menyosialisasikan program partai secara masif, termasuk melalui media sosial dan media elektronik sebagai bagian dari kampanye udara (Djuyandi & Akbar, 2023). Strategi ini bertujuan untuk menambahkan jumlah pendukung baru dan bisa menembus wilayah politik lain dengan mengombinasikan kedua strategi tersebut, Partai Golkar berharap dapat memenangkan Pemilu 2024 dan mengembalikan posisinya sebagai kekuatan politik utama di Indonesia.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Tingkat Provinsi Jawa Barat Pemilu Tahun 2024

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
PARTAI GOLONGAN GOLKAR	4.292.082	16,33%
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.197.376	15,96%
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.505.195	13,33%
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2.983.432	11,35%
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.876.990	10,94%
PARTAI AMANAT NASIONAL	1.885.165	7,17%
PARTAI DEMOKRAT	1.779.410	6,77%
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1.689.044	6,42%
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.197.820	4,56%
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	744.452	2,83%

(Sumber: KPU RI).

Pada tabel 1.1 menunjukkan perolehan suara Partai Golkar pada pemilu 2024 khususnya wilayah Jawa Barat mendapatkan suara sebanyak 16,33 % atau 4.292.082 suara. Dimana sangat jelas sekali bahwa Partai Golkar adalah partai yang paling banyak mendapatkan suara pada pemilu 2024 di wilayah Jawa Barat.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Pemilu Tahun 2024

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI DPRD	PERSENTASE
GERINDRA	4.299.645	20	16,67%
PKS	3.801.816	19	15,83%
GOLKAR	3.590.621	19	15,83%
PDIP	2.970.222	17	14,17%
PKB	2.850.963	15	12,50%
DEMOKRAT	1.727.060	8	6,67%
PAN	1.632.627	7	5,83%
NASDEM	1.553.373	8	6,67%
PPP	1.163.771	6	5,00%
PSI	666.949	1	0,83%

(Sumber: KPU Jawa Barat).

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Partai Golkar mendapat perolehan kursi DPRD Jawa Barat sebanyak 19 kursi. Menurut data KPU Provinsi Jawa Barat Pemilu 2024, Partai Golkar merupakan partai ketiga terbanyak yang mendapatkan perolehan suara. Partai Golkar mendapatkan 3.590.621 suara dari penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berarti Partai Golkar menduduki DPRD Jawa Barat sebanyak 15,83%.

Menurut Wibisono et al (2023) menyatakan bahwa Strategi Pemilu 2024 yang dipakai oleh Partai Golkar ada dua pendekatan utama, yaitu strategi defensif dan strategi ofensif. Seharusnya Partai Golkar melakukan pendekatan kepada masyarakat menggunakan strategi berbasis data dan teknologi, serta pendekatan yang humanis. Menurut Nurfebriansyah & Djuyandi (2024) menyatakan bahwa ada 3 strategi komunikasi politik pada salah satu kader partai Golkar: (1) merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, (2) menciptakan kebersamaan dengan masyarakat, (3) membangun konsensus hingga kompromi politik. Seharusnya dengan strategi ini Partai Golkar mendapatkan perhatian dari masyarakat dan memperoleh suara yang cukup banyak dari pemilihnya. Menurut

Meifilina, (2021) menyatakan bahwa Partai Golkar dalam Pemilu 2024 menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram sebagai strategi utama dalam komunikasi politik dan melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya generasi milenial. Seharusnya dengan metode tersebut Partai Golkar mendapatkan basis suara yang cukup banyak dari kalangan generasi milenial. Menurut Habibah et al., (2025) menyatakan bahwa pendidikan Politik Golkar mengalami tranformasi positif dari 2019 sampai 2024 dengan pendekatan yang lebih modern dan partisipatif. Seharusnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih modern ini dapat mampu memperkuat partisipasi politik yang berkualitas. Menurut Harahap, (2024) menyatakan bahwa untuk memenangkan pemilu 2024 tidak terlepas dari strategi komunikasi politik yang efektif seperti menekankan pentingnya kombinasi konsolidasi kader dengan pendekatan personal. Oleh karena itu, kajian ini memilih strategi komunikasi Politik Golkar ini mendapatkan dukungan baik dari generasi tua maupun generasi muda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bagaimana strategi Partai Golkar dalam memperoleh suara pada Pemilu Jawa Barat 2024. Bukan hanya sekedar strategi dasar, melainkan peneliti ingin benar-benar mendalami bagaimana cara Partai Golkar mendapatkan banyak perolehan suara sehingga menjadi partai yang menduduki parlemen terbesar pertama pada tingkat DPR RI Jawa Barat. Penelitian tersebut sangat penting, karena dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi partai-partai politik lain dalam menyusun strategi yang relevan dan sesuai dengan dinamika politik Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap masyarakat luas dalam pelaksanaan pendidikan politik. Kontribusi lainnya yaitu sebagai bahan pelajaran bagi partai politik lain. Bagaimana cara menaikkan kepercayaan publik dan mendapatkan perolehan suara yang cukup banyak pada pemilu-pemilu yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Partai Golkar

Pada awal berdirinya Golkar bukan mewujudkan sebuah partai, melainkan Golongan Karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Pada tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional (H. P. Sari & Galih, 2020). Partai Golkar berdiri di tahun 1964, Golkar pada awalnya memiliki fungsional, Golkar dahulu menjadi wadah bagi kelompok fungsionaris, pengusaha, dan petani yang mendukung pemerintahan Soekarno (Ayunda et al., 2024). Pada awal 20 Oktober 1964, didirikan Sekber Golkar oleh Soeharto dan Sudirman, sebagai respons

dari Peraturan Presiden No.193 tahun 1964 yang mengintruksikan seluruh organisasi dalam Nasional bergabung dengan parpol atau membentuk organisasi sendiri. Sekber Golkar pun berdiri sebagai wadah dari golongan karya yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu (Golkar, 2022) .

Pada awal berdirinya Sekber Golkar di dukung oleh para perwira ABRI. Pada Pemilu 1971 penyederhanaan organisasi dikumpulkan dalam tujuh kino (Kelompok Induk Organisasi) yang enam dari tujuh ketua kino adalah militer. (D. Sari et al., 2021). Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan membentuk sebuah panitia yang terdiri dari anggota GMP (Gerakan Militer Pelajar), kelompok cendekiawan, dan militer, untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan” (Huda, 2021). Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi (Siregar, 2016).

Pemilu Orde Baru merupakan periode kejayaan Golkar dalam ranah politik Indonesia. Sejumlah kebijakan politik pemerintah memberikan keuntungan bagi kemenangan Golkar (Agustyna, 2016). Golongan Karya memiliki beberapa basis massa sosial politik untuk mendukung keberlangsungan kemenangan pemilu. Pada sejarah berdirinya Partai Golkar, terdapat 3 organisasi yang mendirikan golongan karya yaitu organisasi KOSGORO yang memiliki bidang ekonomi, organisasi SOKSI yang memiliki bidang pekerja atau buruh, dan organisasi MKGR yang fokus bidangnya pada Pendidikan (Rahagi, 2019). Golkar harus hidup mandiri tanpa kekuatan birokrasi dan ABRI seperti masa-masa sebelumnya, Tetapi Golkar juga di tuntutan untuk lebih bersikap demokratis, sesuai dengan tuntutan reformasi (Turmudi & Muchtar, 2021).

Strategi

Strategi merupakan proses seseorang dalam membuat rencana yang memfokuskan tujuan diri guna mencapai hasil yang telah diharapkan (Kusuma et al., 2023). Strategi pembelajaran adalah bagian yang saling berhubungan dengan yang lain dan tidak lepas dari suatu komponen utama yang dapat mendukung bagaimana metode dalam melakukan suatu aktivitas pembelajaran serta membagikan suatu pengalaman pembelajaran dengan menggunakan media yang canggih seperti teknologi pembelajaran (Hasriadi, 2022). Pembelajaran era digital saat ini menjadi keharusan untuk setiap Lembaga Pendidikan, metode-metode lama (konvensional) sedikit banyak sudah Lembaga Pendidikan, meskipun sebagai masih ada yang mempertahankan cara-cara lama dan tetap mengikuti cara baru sebagai penyesuaian diri Lembaga Pendidikan karena tuntutan zaman (Azis, 2019).

Dalam perolehan suara Partai Golkar di Pemilu Jawa Barat 2024 memiliki dua strategi yaitu:

Strategi Ofensif (menyerang)

Strategi Ofensif yaitu strategi perluasan pasar dalam penerapan peraturan baru, untuk menjalankan program yang telah dirancangnya dengan cara menentukan tujuan, faktor yang mempengaruhi, pengarahannya apa yang dilakukan, dan tindakan apa yang dilakukan. Strategi ofensif selalu dibutuhkan apabila partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya atau apabila pihak eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Pada dasarnya, semua strategi ofensif yang diterapkan pada saat kampanye pemilu harus menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik antara suatu kekuatan politik dengan partai partai pesaing yang ingin diambil alih pemilihnya (Djuyandi & Akbar, 2023)

Strategi Defensif (bertahan)

Strategi Defensif menyangkut strategi untuk mempertahankan basis konstituen (pemilih tradisionalnya) dan strategi untuk menutup penyerangan dari partai lain. Strategi defensif akan muncul ke permukaan, salah satunya apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya apabila *potential constituent* (pemilih potensial) ingin dipertahankan. Selain itu, strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah arena kontestasi atau basis konstituen tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan basis konstituen diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin (Djuyandi & Akbar, 2023).

Pemilu 2024

Pemilu adalah proses demokrasi yang digunakan untuk memilih pejabat publik dari jalur politik di legislatif dan eksekutif secara langsung oleh rakyat. Pemilu berfungsi sebagai instrumen utama dalam demokrasi, untuk menentukan wakil rakyat dan kepala pemerintahan secara adil dan transparan. Sistem pemilu mengatur bagaimana suara rakyat dihitung dan dialokasikan kepada calon legislatif maupun eksekutif. Di Indonesia, pemilu memiliki karakteristik tersendiri dengan dinamika yang kompleks, termasuk sistem pemilu proporsional terbuka untuk legislatif, tantangan dalam daftar pemilih tetap, politik uang, serta keterkaitan erat dengan partai politik dan sistem politik nasional. Sistem pemilu di Indonesia terus mengalami perubahan hukum dan regulasi untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan sosial masyarakat. Secara umum, tujuan pemilu adalah mewujudkan perwakilan rakyat yang sah, memastikan dinamika demokrasi yang sehat, menjaga stabilitas politik,

serta menghasilkan pemerintahan yang dapat menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemilu juga merupakan arena kompetisi politik yang mengatur distribusi kekuasaan melalui mekanisme pemilihan yang dipercayai oleh masyarakat (Husein, 2014).

Pemilu merupakan sarana atau alat pengembalian hak ummat untuk memilih wakilnya yang nantinya akan berbicara, menyampaikan pendapat, menuntut, membela dan melindungi hak-haknya dari hal-hal yang merugikan mereka. Oleh karena itu partai politik maupun pemilu mempunyai kedudukan yang amat strategi bagi terwujudnya pemerintahan yang amanah sesuai dengan kehendak dan cita-cita umat (Zulhendra, 2022).

Sejarah pemilihan umum di Indonesia hingga akhir periode Soeharto, Pemilu 1955 dianggap merupakan pemilihan yang paling demokratis. Pemilu 1955 itu bahkan dianggap merupakan peristiwa kedua terbesar setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sehingga dapat di perkirakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia antusias sekali menghadapi peristiwa bersejarah itu. Apalagi berbagai tuntunan dan harapan dari rakyat agar pemilu dapat mengatasi segala persoalan yang dihadapi bangsa ketika itu, baik berupa kemelut politik yang berkepanjangan, kemerosotan ekonomi, maupun ancaman terhadap keamanan. Paling tidak rakyat berharap Pemilu itu dapat menciptakan suatu pemerintahan nasional dalam segala bidang. Sejarah formal, rencana pelaksanaan Pemilu baru mendekati kenyataan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan politik mengenai terbentuknya Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 November 1953, PPI dilantik dan diangkat sumpahnya oleh kepada negara pada tanggal 28 November 1953. Dilanjutkan pada Kabinet Wilopo, yang berhasil merumuskan dan mensahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Pemilu 1953 (Santoso & Budhiati, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan, menggali, serta memahami secara mendalam strategi, pola komunikasi politik, dinamika internal dan eksternal Partai Golkar dalam upaya meningkatkan perolehan suara Pemilu Jawa Barat 2024 (Creswell & Creswell, 2017). Hal ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berupaya menggambarkan komprehensif bagaimana Partai Golkar merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi politiknya dalam menghadapi kompetisi elektoral. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat deskriptif

melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, sehingga mampu mengungkap realitas sosial dan politik yang terjadi di balik partai. Metode ini juga meneliti untuk menangkap konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi pengambilan keputusan politik di internal partai, serta interaksi antara aktor-aktor politik yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dianggap paling sesuai untuk memahami strategi Partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu Jawa Barat 2024 secara mendalam dan holistik.

Dalam riset ini, pendekatan kualitatif diterapkan untuk menguraikan, menggali, serta memahami secara mendalam berbagai strategi, pola komunikasi politik, dan dinamika yang terjadi di dalam dan luar Partai Golkar dalam upayanya menaikkan suara pada Pemilu Jawa Barat 2024. Proses pengumpulan data melibatkan wawancara intensif dengan pengurus dan kader DPD Partai Golkar Jawa Barat, pengamatan terhadap aktivitas partai seperti sosialisasi dan kampanye, serta pengumpulan dokumen berupa data hasil pemilu, dan publikasi media yang terkait (Farhan, 2023). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan kerangka kerja Miles dan Huberman, terdiri atas tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sekaligus verifikasi, yang dilakukan secara terus menerus dan interaktif sepanjang proses penelitian. Demi memastikan keandalan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi mulai dari sumber, metode, hingga waktu, serta melakukan pengecekan ulang atas informasi bersama para informan. Dengan kombinasi metode, teknik analisis, dan validasi yang komprehensif ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai strategi Partai Golkar dalam mengoptimalkan perolehan suara pada Pemilu Jawa Barat 2024.

Objek penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, penelitian berfokus pada analisis konten media sosial Partai Golkar Jawa Barat, khususnya akun resmi di Instagram, untuk menelaah bagaimana partai memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi politik, pembentukan citra, dan penyebaran pesan kampanye kepada publik. Kedua, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan beberapa pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi dan kebijakan partai di tingkat daerah dalam upaya meningkatkan perolehan suara pada Pemilu Jawa Barat 2024. Melalui kombinasi antara analisis media sosial dan wawancara langsung, peneliti berupaya menggambarkan sinergi antara strategi komunikasi digital dengan praktik politik di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di daerah Jl. Maskumambang No.2, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan batasan pengurus dan anggota DPD Partai Golkar Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi politik, pola

kepemimpinan, serta dinamika internal dan eksternal yang terjadi dalam tubuh partai di tingkat daerah Jawa Barat. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran dan upaya pengurus DPD Partai Golkar dalam meningkatkan elektabilitas partai menjelang Pemilu 2024 di Jawa Barat, baik melalui kegiatan sosial, pendekatan kepada masyarakat, maupun strategi media dan publik dalam melaksanakan perolehan suara pada Pemilu Jawa Barat 2024.

Pada penelitian ini, kami menggunakan teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw. Teori ini menawarkan penjelasan mengapa informasi tentang isu tertentu tersedia bagi publik, bagaimana opini publik dibentuk, dan mengapa beberapa isu direspon melalui kebijakan sementara yang lain tidak.

Agenda adalah sekumpulan isu yang dikomunikasikan dalam hierarki kepentingan pada suatu waktu. agenda politik sebagai sekumpulan kontroversi politik yang dipandang relevan dengan perhatian publik. Agenda berubah-ubah karena isu naik turun pentingnya seiring waktu (Elder, 2014). Elder mendefinisikan isu sebagai konflik antara dua atau lebih kelompok yang dapat dikenali terkait posisi atau sumber daya. Sifat konflikual membuat isu menarik untuk media. Banyak masalah sosial tidak pernah menjadi isu publik meskipun ada pihak pro-kontra.

Proses penetapan agenda terdiri dari agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan, serta hubungan timbal balik di antara ketiga elemen pada gambar 1.1. Terdapat tradisi penelitian untuk masing-masing dari ketiga jenis agenda ini. Tradisi penelitian pertama disebut penetapan agenda media karena variabel dependen utamanya adalah pentingnya suatu isu dalam agenda media massa. Tradisi penelitian kedua disebut penetapan agenda publik karena variabel dependen utamanya adalah pentingnya serangkaian isu dalam agenda publik. Tradisi penelitian ketiga disebut penetapan agenda kebijakan karena aspek khas dari tradisi ilmiah ini adalah perhatiannya terhadap tindakan kebijakan terkait suatu isu, sebagian sebagai respons terhadap agenda media dan agenda publik. Jadi, proses penetapan agenda merupakan kompetisi yang berkelanjutan di antara para pendukung serangkaian isu untuk mendapatkan perhatian para profesional media, publik, dan elit kebijakan. Namun, penetapan agenda awalnya tidak dikonseptualisasikan dengan cara ini (Rogers, 1996).

Korelasi teori agenda setting dengan penelitian kami :

Teori agenda setting menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan publik, tetapi memengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Dengan kata lain, media membentuk prioritas isu di benak masyarakat melalui penonjolan isu tertentu (*issue salience*). Strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam Pemilu Jawa Barat 2024 tidak bisa dipisahkan dari bagaimana

partai ini mengatur agenda isu yang ingin ditonjolkan kepada publik melalui media massa maupun media sosial. Adapun implementasi strategi Partai Golkar dalam agenda setting dapat dijelaskan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Penjelasan Penelitian dengan Teori Agenda Setting

Agenda Media	Partai Golkar berupaya memengaruhi liputan media dengan mengangkat isu yang sesuai dengan citra partai. Contohnya seperti pembangunan ekonomi, stabilitas politik, atau pengalaman kader.
Agenda Publik	Isu yang ditonjolkan Partai Golkar melalui media diharapkan menjadi perhatian utama masyarakat, sehingga membentuk persepsi positif dan mendorong dukungan suara.
Agenda Politik	Penetapan isu strategis tertentu, merupakan bagian dari upaya Partai Golkar untuk menegaskan peran dan posisi politiknya di tengah kompetisi Pemilu 2024.

HASIL DAN DISKUSI

Wawancara dengan Informan 1

Partai Golkar secara intensif memanfaatkan media massa sebagai sarana utama untuk membentuk citra positif dengan menyampaikan isu strategis seperti pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan pengalaman kader. Isu pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, seperti pembinaan UMKM dan perbaikan rumah tidak layak huni, menjadi fokus yang membangun kepercayaan masyarakat di Jawa Barat. Pesan stabilitas politik yang dikomunikasikan secara konsisten melalui media juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Golkar. Media sosial dan Media Penggalangan Opini (MPO) digunakan untuk meningkatkan visibilitas partai selama kampanye. Strategi agenda setting dipakai untuk mengarahkan perhatian publik pada isu unggulan partai sehingga mampu mempengaruhi persepsi dan diterjemahkan ke program politik partai di lapangan. Secara keseluruhan, strategi komunikasi yang terorganisir ini berkontribusi signifikan pada peningkatan suara Golkar di Jawa Barat pada Pemilu 2024.

Wawancara dengan Informan 2

Partai Golkar menggunakan berbagai media elektronik seperti televisi, media sosial, dan media luar ruang seperti baliho untuk membentuk citra positif dan meningkatkan popularitas. Fokus isu yang diangkat terkait pro-rakyat, peningkatan UMKM, pembangunan daerah, dan stabilitas politik mencerminkan kepentingan masyarakat yang disampaikan secara konsisten. Media

membantu Golkar untuk meredam isu negatif sekaligus memperkuat keberadaan kader yang dekat dengan rakyat. Konten yang mudah diakses oleh pemilih muda dibuat secara kreatif, termasuk video dan poster digital. Strategi agenda setting digunakan dengan mengulang isu-isu unggulan yang relevan pada berbagai platform media serta kegiatan publik sehingga publik menganggap isu tersebut penting. Media sangat berpengaruh dalam menetapkan dan menyebarkan isu strategis partai, yang turut meningkatkan perolehan suara Golkar pada Pemilu Jawa Barat 2024.

PEMBAHASAN

1. Strategi Partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara dalam pemilu jawa barat 2024 dari segi agenda media

Media sosial berfungsi tidak hanya sebagai media penyebar informasi, tetapi juga sebagai media untuk membangun opini public (Mirza, 2022), menggerakkan partisipasi politik, dan menyelenggarakan komunikasi dua arah dengan audiens melalui interaksi, survei daring, dan kampanye berbasis komunitas (Heryanto, 2018). Hasil wawancara dari Partai Golkar mendukung bahwa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, facebook, dan twitter untuk meraih suara pemilih media. Sejalan dengan penelitian menurut De Vreese et al., (2018), menyatakan bahwa media tidak hanya bertindak sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai opini publik.

Argumentasi : Media sosial berperan sebagai arena strategis bagi partai politik untuk membentuk opini publik, meningkatkan partisipasi politik, dan membangun komunikasi dua arah dengan pemilih. Temuan wawancara dengan Partai Golkar menunjukkan bahwa pemanfaatan platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter tidak hanya dimaksudkan untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk mempengaruhi persepsi politik dan memperluas jangkauan elektoral.

Partai Golkar diketahui sangat aktif memanfaatkan media massa sebagai alat agenda media untuk membentuk citra positif partai. Dengan strategi penyebaran informasi melalui berbagai platform media, Partai Golkar berupaya menampilkan diri sebagai partai yang stabil, berpengalaman, dan pro-rakyat (PAJRI, 2022). Isu yang diangkat cenderung mencerminkan kepentingan politik Partai Golkar, seperti pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan pengalaman kader. Fokus pada isu-isu ini bertujuan memperkuat citra partai sebagai pemimpin pembangunan dan penyambung aspirasi masyarakat (Wawancara Partai Golkar, 2025). Semua program Golkar pro-rakyat, lalu untuk menampung aspirasi masyarakat kita jumpai dan kita sampaikan ke parlemen. media yang digunakan benar-benar mampu menembus persepsi masyarakat secara luas atau sekadar menguatkan citra di kalangan tertentu saja, karena dalam politik, keberhasilan membentuk citra tidak hanya bergantung pada intensitas pemberitaan, tetapi juga pada kualitas pesan yang disampaikan (Aragon, 2017).

Argumentasi : Aktivitas Partai Golkar dalam memanfaatkan media massa menunjukkan upaya sistematis untuk membangun citra politik yang stabil, berpengalaman, dan berpihak pada masyarakat. Pengangkatan isu-isu seperti pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan rekam jejak kader berfungsi sebagai strategi agenda setting yang diarahkan untuk memperkuat legitimasi partai di mata publik. Meskipun media mampu memperluas jangkauan pesan politik, efektivitasnya tetap ditentukan oleh kualitas dan relevansi pesan yang disampaikan. Dengan demikian, keberhasilan Golkar dalam membentuk citra positif tidak hanya bergantung pada intensitas eksposur media, tetapi juga pada sejauh mana pesan pro-rakyat tersebut diterima sebagai representasi autentik dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu strategi penting yang didukung oleh media masa dan sosial untuk membangun kepercayaan kepada Golkar. Media sosial memungkinkan penonjolan capaian dan profil kader secara lebih personal dan mendalam (Sutisna & SH, 2024). Partai Golkar memberi peran berupa pemberitaan terhadap kader yang berpengalaman sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kader Golkar juga selalu dekat dengan masyarakat (Wawancara Partai Golkar, 2025). Pengaruh media sosial juga besar dalam menetapkan isu politik strategis, terutama di Jawa Barat, namun harus dihadapi dengan manajemen komunikasi yang tepat agar narasi partai tetap dominan menurut Irawan et al., (2025).

Argumen : Pemanfaatan media massa dan media sosial menjadi instrumen strategis bagi Partai Golkar dalam membangun kepercayaan publik, terutama melalui penonjolan capaian serta profil kader yang berpengalaman dan dekat dengan masyarakat. Strategi ini memperkuat personalisasi politik sekaligus memperluas jangkauan narasi partai. Namun, dominasi isu politik di ruang digital menuntut manajemen komunikasi yang efektif agar pesan strategis Golkar tetap konsisten dan kompetitif, khususnya dalam konteks dinamika politik di Jawa Barat. Dengan demikian, keberhasilan penguatan citra partai bergantung pada kemampuan mengelola komunikasi publik secara terstruktur dan adaptif terhadap perkembangan media.

2. Strategi Partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara dalam pemilu jawa barat 2024 dari segi agenda publik

Menurut Labolo & Ilham (2015) Partai politik adalah yang mampu membentuk komunikasi dua arah dengan masyarakat dan menjadikan pemilu bukan hanya sebagai ajang kontestasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang melibatkan konstituen secara aktif, hal ini tampak dari upaya Partai Golkar dalam mendorong partisipasi publik melalui berbagai forum warga, kegiatan sosial, keagamaan, hingga pelatihan ekonomi yang bersifat inklusif. Bahwa sangat setuju dengan mendorong

partisipasi publik melalui berbagai hal, supaya dapat perhatian masyarakat setelah sering ditampilkan melalui media dan kegiatan publik. Publik merasa sangat penting karena relevan dengan kebutuhan sehari-hari dan Partai Golkar menyampaikan pesan tersebut secara konsisten. Pesan mengenai stabilitas politik juga dinilai meningkatkan kepercayaan publik, khususnya karena Golkar menggunakan media untuk meredam informasi negatif dan memperkuat citra sebagai partai yang solid (Wawancara Partai Golkar, 2025). Sejalan dengan penelitian (Isabella & Martini, 2024) yang menekankan bahwa komunikasi politik yang membumi dan partisipatif mampu membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah.

Argumentasi : Partai Golkar menunjukkan bahwa komunikasi politik yang bersifat dua arah dan berbasis partisipasi publik mampu memperkuat kedekatan dengan konstituen. Keterlibatan dalam forum warga, kegiatan sosial-keagamaan, dan pelatihan ekonomi menjadikan pesan politik partai lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan visibilitas dan kepercayaan publik. Konsistensi narasi mengenai stabilitas politik serta pemanfaatan media untuk mengelola informasi negatif turut memperkuat citra partai sebagai aktor politik yang solid. Temuan ini sejalan dengan kajian sebelumnya yang menegaskan bahwa komunikasi politik yang membumi dan partisipatif efektif dalam membentuk persepsi positif serta meningkatkan legitimasi politik di tingkat publik.

Pesan tentang stabilitas politik yang disampaikan partai golkar melalui media berhasil meningkatkan kepercayaan publik karena selalu konsisten dan relevan dalam komunikasi politik yang efektif dengan memanfaatkan media sosial dan media digital menurut Muhaikal et al.,(2025). Pesan mengenai stabilitas politik juga dinilai meningkatkan kepercayaan publik, khususnya karena Partai Golkar menggunakan media untuk meredam informasi negatif dan memperkuat citra sebagai partai yang solid (Wawancara Partai Golkar, 2025). Di sisi lain ada kritik yang menyatakan bahwa pesan tersebut lebih bersifat manipulatif dan berfungsi sebagai alat untuk meredam informasi negatif saja, bukan sebagai cerminan nyata dari stabilitas politik menurut Sarihati et al.,(2022).

Argumentasi : Pesan stabilitas politik yang disampaikan Partai Golkar dinilai efektif meningkatkan kepercayaan publik karena konsisten, relevan, dan didukung pemanfaatan media digital untuk memperkuat citra partai. Namun, efektivitas tersebut masih diperdebatkan, sebab sebagian pihak menilai pesan tersebut lebih bersifat strategis dan manipulatif, terutama dalam meredam informasi negatif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan stabilitas politik yang nyata.

Dalam konteks media sosial, pesan tentang pembangunan ekonomi dan stabilitas politik yang diangkat Partai Golkar bisa lebih cepat tersebar dan mengundang diskusi publik yang lebih luas.

Media sosial dapat memperkuat persepsi positif jika pesan tersebut didukung oleh data dan fakta yang meyakinkan menurut E. N. Sari et al.,(2025). Isu pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, seperti pembinaan UMKM dan perbaikan rumah tidak layak huni, menjadi fokus yang membangun kepercayaan masyarakat di Jawa Barat (Wawancara Partai Golkar, 2025). Isu pembangunan ekonomi ini benar-benar merefleksikan perubahan ekonomi yang nyata di lapangan, atau lebih sebagai alat strategi politik untuk menarik simpati pemilih. Beberapa kritik menyatakan bahwa meskipun program-program tersebut mendapat sorotan media positif, implementasi dan dampak jangka panjangnya harus terus dipantau agar tidak hanya menjadi janji kampanye semata (Ismail, 2018).

Argumentasi : Penyebaran isu pembangunan ekonomi oleh Partai Golkar melalui media sosial menunjukkan bagaimana ruang digital dapat memperkuat citra politik ketika pesan yang disampaikan disertai data dan capaian empiris. Fokus pada program-program seperti pembinaan UMKM dan perbaikan rumah tidak layak huni berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Namun, efektivitas isu tersebut tetap memerlukan verifikasi berbasis implementasi nyata di lapangan. Dengan demikian, narasi pembangunan ekonomi yang dikedepankan partai politik tidak semestinya dipahami semata sebagai strategi elektoral, melainkan harus diuji melalui konsistensi pelaksanaan dan dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan publik.

3. Strategi Partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara dalam pemilu Jawa Barat 2024 dari segi agenda politik

Strategi komunikasi politik melalui media terbukti cukup berkontribusi terhadap peningkatan perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilu Jawa Barat 2024, karena media digunakan secara efektif untuk menyebarkan pesan yang konsisten dan relevan kepada pemilih (Nadjamuddin, 2025). Hasil wawancara dari Partai Golkar strateginya dengan program politik pada penguatan UMKM, pembangunan daerah, dan penyebaran aspirasi masyarakat melalui parlemen. Meskipun strategi komunikasi politik melalui media dinilai berkontribusi pada peningkatan suara Partai Golkar dalam Pemilu Jawa Barat 2024, klaim ini perlu dipertimbangkan lebih kritis. Media memang menjadi alat penting dalam penyebaran pesan, namun keberhasilan meraih suara tidak semata-mata tergantung pada efektivitas komunikasi digital menurut Imamia et al., (2025).

Argumentasi : Strategi komunikasi politik Partai Golkar melalui media turut mendukung meningkatnya perolehan suara pada Pemilu Jawa Barat 2024 karena pesan mengenai penguatan UMKM, pembangunan daerah, dan penyaluran aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan konsisten serta mudah dipahami oleh pemilih. Meskipun demikian, efektivitas penggunaan media

tidak dapat dianggap sebagai faktor tunggal yang menentukan keberhasilan politik. Kenaikan suara juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, mutu program yang dijalankan, serta kedekatan kader dengan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi politik Golkar perlu dianalisis secara lebih menyeluruh dan tidak hanya dikaitkan dengan pemanfaatan media digital.

Pemberitaan mengenai kader-kader yang memiliki pengalaman luas memegang peranan krusial dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap Partai Golkar. Dengan menampilkan tokoh-tokoh yang sudah dikenal lama serta memiliki rekam prestasi yang jelas, partai ini mampu menunjukkan tingkat kredibilitas dan kestabilan dalam kepemimpinan kepada masyarakat. Kader berpengalaman sering dianggap mampu mengatasi berbagai tantangan politik dan melaksanakan program partai dengan baik, sehingga memberikan rasa percaya dan keamanan bagi pemilih (Turmudi & Muchtar, 2021). Kegiatan kader dan publikasi kampanye dilakukan untuk semakin memperkuat penerimaan masyarakat terhadap isu-isu prioritas tersebut. Dengan demikian, isu yang masuk ke media dan menjadi perhatian publik akhirnya diintegrasikan ke dalam agenda politik partai pada level kebijakan dan program kerja. Dalam terkait tata kelola komunikasi dan tanggapan partai terhadap kritik di media social (Wawancara Partai Golkar, 2025). Kasus pelaporan akun-akun media sosial yang mengunggah meme atau kritik terhadap Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, oleh sayap partai seperti AMPG dan AMPI menunjukkan adanya pendekatan defensif yang dianggap sebagian publik sebagai pembungkaman kritik (Mulyadi & Hendaryan, 2025).

Argumentasi : Penonjolan kader yang memiliki pengalaman panjang memegang peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar karena menampilkan figur yang dinilai memiliki kompetensi dan stabilitas kepemimpinan. Publikasi mengenai aktivitas kader dan kampanye turut memperkuat penerimaan publik terhadap isu politik yang dianggap penting dan kemudian diakomodasi dalam program serta kebijakan partai. Namun dalam praktik pengelolaan komunikasi, respons partai terhadap kritik di media sosial menunjukkan kecenderungan bersifat defensif. Pelaporan terhadap akun yang mengunggah kritik terhadap Ketua Umum Golkar memunculkan kesan bahwa partai masih kurang menerima kritik secara terbuka. Oleh karena itu, meskipun strategi menampilkan kader berpengalaman mendukung penguatan citra partai, efektivitas komunikasi politik tetap memerlukan sikap yang lebih terbuka dan adaptif terhadap dinamika opini publik.

Golkar memanfaatkan pemberitaan yang intensif dan selektif di media untuk membentuk persepsi publik bahwa isu-isu yang diangkat partai adalah hal yang penting dan layak diperhatikan. Strategi ini juga melibatkan penggunaan kampanye terbuka, pemasaran politik, dan pengoptimalan

peran sayap partai untuk memperkuat eksposur isu unggulan seperti bantuan modal UMKM, beasiswa pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Marentin & Poernomo, 2025). Isu-isu yang telah ditonjolkan melalui media dan diterima masyarakat kemudian menjadi dasar bagi tindakan politik Golkar di lapangan, Golkar sengaja menonjolkan sejumlah isu unggulan, terutama stabilitas ekonomi, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas SDM, serta kedekatan kader dengan masyarakat (Wawancara Partai Golkar, 2025). Penonjolan isu secara berulang menunjukkan bahwa Golkar secara aktif mengatur agenda media untuk memastikan bahwa isu tersebut mendapatkan ruang publik yang luas. Bahwa pendekatan ini dapat menimbulkan bias media dan manipulasi opini publik. Media yang dikendalikan atau sangat dipengaruhi oleh elit partai kadang-kadang hanya menampilkan isu-isu yang menguntungkan partai tersebut, sehingga mengabaikan isu-isu yang lebih penting bagi masyarakat luas (Bahagia, 2025).

Argumentasi : Strategi komunikasi politik Partai Golkar menunjukkan pemanfaatan intensitas dan seleksi isu dalam pemberitaan media untuk membentuk persepsi publik. Dengan menyoroti tema seperti stabilitas ekonomi, penguatan UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan kedekatan kader dengan masyarakat, Golkar berupaya mengarahkan agenda publik melalui agenda setting dan political marketing, dibantu kampanye terbuka dan aktivitas sayap partai. Namun, pengaturan agenda media semacam ini berpotensi menimbulkan bias, mengurangi keragaman informasi, dan membuka peluang manipulasi opini. Karena itu, meskipun efektif meningkatkan visibilitas partai, strategi ini menimbulkan pertanyaan etis tentang independensi media dan kualitas demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Jawa Barat 2024 menunjukkan bahwa partai ini secara efektif menggunakan media massa dan media sosial untuk membentuk citra positif serta menonjolkan isu-isu unggulan seperti pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan pemberdayaan UMKM. Melalui agenda setting, Golkar berhasil mengarahkan perhatian publik pada isu-isu tersebut secara konsisten, sehingga membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, kombinasi strategi defensif dan ofensif yang melibatkan konsolidasi internal dan ekspansi basis dukungan terbukti mampu memperkuat posisi Golkar sebagai partai dengan perolehan suara signifikan. Namun, keberhasilan tersebut juga harus terus dipertimbangkan secara kritis, khususnya dalam konteks kualitas implementasi program di lapangan dan keberimbangan pemberitaan agar demokrasi tetap terbuka dan partisipatif. Secara keseluruhan, strategi komunikasi yang terstruktur dan terpadu ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan elektabilitas Golkar pada Pemilu 2024 di Jawa Barat.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

Agustyna, M. (2016). Strategi Kampanye Politik Golkar Pada Pemilihan Umum 1977-1987: Dalam Perspektif Pemberitaan di Surat Kabar Suara Karya dan Merdeka. *Avatara*, 4(3).

- Satryo Putra Pratama¹, Elsyam Alfarisi², Yanuar Alfiansyah³, *Strategi Partai Golkar Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Jawa Barat 2024*, JSIPOL, Vol.5 Issue.1 No.3, Januari 31, 2026
- Aragon, H. H. (2017). *Efektivitas Terpaan Informasi Melalui Media Sosial dan Media Cetak Dalam Membangun Citra Kandidat Pilgub Banten dan Membentuk Sikap Politik Masyarakat*.
- Ayunda, N. D., Mutiara, A., Dewi, S., Zusrieka, M., & Galuh, C. (2024). *Analisis Strategi Dan Inovasi Politik Partai Golkar*. 8(10), 6–12.
- Azis, T. N. (2019). Strategi pembelajaran era digital. *The Annual Conference on Islamic Education and Social Science*, 1(2), 308–318.
- Bahagia, M. (2025). Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik: Studi Kasus Pada Pengaruh Pemberitaan Politik Terhadap Preferensi Pemilih Dalam Pemilihan Umum. *Grondwet*, 4(1), 50–64.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- De Vreese, C. H., Esser, F., Aalberg, T., Reinemann, C., & Stanyer, J. (2018). Populism as an expression of political communication content and style: A new perspective. *The International Journal of Press/Politics*, 23(4), 423–438.
- Djuyandi, Y., & Akbar, A. H. B. M. (2023). Strategi Pemenangan Partai Golkar dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 7(1), 1–10.
- Elder, C. &. (2014). *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building*. By Roger Cobb and Charles Elder. (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1972. Pp. 182. \$3.50.). Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/participation-in-american-politics-the-dynamics-of-agenda-building-by-cobb-roger-and-elder-charles-boston-allyn-and-bacon-inc-1972-pp-182-350/0296A1EE9F199FEC8FBDD351A9591>
- Farhan, A. M. (2023). *Kaderisasi Partai Politik Berbasis Digital: Studi Kasus Golkar Institute Pada Partai Golongan Karya*. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
- Golkar, S. (2022). *Sejarah Berdirinya Partai Golkar*. Kompas.Com.
- Habibah, S. Z. N., Aldjabri, R. H. T., Ayu, N. R., Susilo, G. P., & Hanifan, H. Z. (2025). Perbandingan Pendidikan Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2019 dan 2024. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 6(1), 42–60.
- Harahap, R. R. P. (2024). *KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DALAM KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF 2024 (Studi di Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara)*. Universitas Malikussaleh.
- Hasriadi, H. (2022). *Strategi Pembelajaran*. Mata Kata Inspirasi.
- Heryanto, G. G. (2018). *Media komunikasi politik*. IRCiSoD.
- Huda, S. S. N. (2021). *Perkembangan partai Golkar di Kota Bandung tahun 1964-2019*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Satryo Putra Pratama¹, Elsyam Alfarisi², Yanuar Alfiansyah³, *Strategi Partai Golkar Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Jawa Barat 2024, JSIPOL, Vol.5 Issue.1 No.3, Januari 31, 2026*

Husein, H. (2014). Pemilu Indonesia. *Jakarta: Perludem.*

Imamia, A., Zehro, A. I., Sjarif, E. I., Rizkiyah, T., Jennah, R., & Rusdani, Z. (2025). *Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia*. Penerbit: Kramantara JS.

Irawan, E. P., Retnowati, Y., Adnyana, P. E. S., Anwar, R., & Candra, F. (2025). *Komunikasi Politik: Teori, Strategi, dan Implementasi*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.

Isabella, K. A., & Martini, A. (2024). *Pengaruh Komunikasi Politik Kepala Daerah Terhadap Kepercayaan Publik di Kabupaten Sintang*. IPDN.

Ismail, H. (2018). *Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Isu Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Kusuma, J. W., Arifin, S. P., Abimanto, D., Hum, A., Hamidah, M. P., Haryanti, Y. D., Khoiri, A., Evi Susanti, S. E., Khoir, Q., & Ni'ma, M. A. (2023). *Strategi pembelajaran*. Cendikia Mulia Mandiri.

Labolo & ilham. (2015). *Nan sistem phmilihan umum di*.

Marentin, C., & Poernomo, M. I. (2025). Distribusi Pesan Politik Calon Anggota Legislatif DPRD Partai Golkar Jakarta Barat Pada Pemilu 2024. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 8(1), 39–49.

Meifilina, A. (2021). Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Melakukan Pendidikan Politik. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(2), 101–110. <https://doi.org/10.33366/jkn.v3i2.80>

Mirza, I. M., & Kusumasari, B. (2022). Reality Construction of Disaster Discourses on Twitter: Analysis of Corpus-Assisted Discourse Study on Forest Fires in Indonesia From 2014–2019. *Annals of burns and fire disasters*, 35(4), 334.

Muhaikal, A., Nurfurkon, S., & MH, A. (2025). *KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GOLKAR DALAM MEMPERTAHANKAN ELEKTABILITAS POLITIK DI KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Mulyadi, H., & Hendaryan, H. (2025). Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Bahlil Lahadalia (Alternatif Model Bahan Ajar Teks Debat). *Diksatrasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 9(2), 341–355.

Nadjamuddin, R. S. (2025). *Analisis Konten Media Sosial pada Akun Calon Presiden Pemilu 2024 dalam Meningkatkan Personal Branding*. Universitas Islam Indonesia.

Nurfebriansyah, A. R., & Djuyandi, Y. (2024). Strategi Komunikasi Politik Sarmuji dalam Menambah Kursi Partai Golkar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI pada Pemilu 2024. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 204–211. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3907>

PAJRI, R. (2022). *Strategi komunikasi politik DPD Partai Golkar dalam membangun brand image Golkar Bangkit di Kabupaten Kampar*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Rahagi, E. (2019). *Marketing Politik Calon Legislatif Milenial Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif 2019 Studi Kasus: Pemenangan Abraham Sridjaja Sebagai Caleg Dpr Ri Dapil 1 Jawa*

Satryo Putra Pratama¹, Elsyam Alfarisi², Yanuar Alfiansyah³, *Strategi Partai Golkar Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Jawa Barat 2024*, JSIPOL, Vol.5 Issue.1 No.3, Januari 31, 2026

Timur (SURABAYA-SIDOARJO). UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Ramadhan, I. (2021). *Indonesia adalah Negara Demokrasi*.

Rogers, D. &. (1996). *Agenda - Setting*. Sage Publication.
https://books.google.co.id/books?id=ctlyAwAAQBAJ&pg=PA1&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false

Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar Grafika.

Sari, D., Darmawan, W., & Manan, F. (2021). Rekrutmen Calon Legislatif Muda Partai Golongan Karya Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 987–995.

Sari, E. N., Gunawan, R., Firdauzy, M., Mufidah, I., Andini, D. C., & Magfiroh, F. (2025). *Konsep Komunikasi Politik Dalam Proses Pembangunan*. Penerbit: Kramantara JS.

Sari, H. P., & Galih, B. (2020). *Ini Susunan Lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar 2019-2024*. Nasional Kompas.

Sarihati, T., Si, M., Luthfie, H. M., Kurniadi, B., & Si, M. (2022). *Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Siregar, A. M. (2016). *Strategi Partai Golkar dalam Pemenangan Pasangan Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015*.

Sutisna, I. N., & SH, M. B. A. (2024). *Digital Marketing For Politics: Pemasaran Politik Era Digital*. Penerbit Adab.

Turmudi, H., & Muchtar, K. (2021). *Komunikasi Politik Elite Golkar Dalam Rekonsiliasi Dualisme Kepemimpinan Partai*. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung

Wibisono, D. D., Puspa, R., & Widodo, S. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Mempertahankan Suara Partai Sebagai Partai Tengah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 832–842.
<https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.284>

Zulhendra, J. (2022). Pemilu (Pemilihan Umum) dalam kajian politik Islam. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1 April), 17–33.

BANTUAN SOSIAL SEBAGAI SARANA KEKUATAN POLITIK: MENGURAI BATAS TIPIS DENGAN POLITIK UANG DI PEMILU PADANG 2024

Tessa Agustina¹, Doni Hendrick²

Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia^{1,2}

E-mail Coresponden : thesagsyn@gmail.com

ABSTRACT

This study examines how social assistance (bansos) transforms from a state welfare instrument into a source of political power in the 2024 Padang Election. Normatively, social assistance is designed to protect poor and vulnerable groups; however, in practice, it frequently intersects with electoral interests, creating a grey area between legally sanctioned social policy and covert forms of vote-buying. This research employs a literature study method by reviewing Padang City budget documents (APBD), regulatory frameworks related to social assistance and elections, institutional reports, academic publications, and media coverage of aid distribution prior to the election. The findings reveal a significant increase in the social assistance budget in 2023 the pre-election year followed by a steep decline in 2024, reflecting a pattern of pre-electoral resource mobilization. The concentration of aid distribution in November-December further indicates a strategic alignment between welfare allocation and electoral momentum. This pattern operates through interactions among government actors, political volunteers, and beneficiaries, producing reciprocal perceptions that resemble vote-buying mechanisms despite the absence of explicit transactions. Thus, the study argues that social assistance can function as an effective political instrument and as a form of concealed vote-buying that is difficult to capture legally yet powerful from a sociological perspective. These findings underline the urgency of strengthening regulations and oversight of social assistance during electoral periods and ensuring a clear separation between the state's welfare function and political actors' electoral interests.

Keywords: *social assistance, vote-buying, Padang election, grey area, welfare distribution.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana bantuan sosial (bansos) bertransformasi dari instrumen kesejahteraan negara menjadi sarana kekuatan politik dalam kontestasi Pemilu Padang 2024. Secara normatif, bansos dirancang untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, namun dalam praktiknya sering bersinggungan dengan kepentingan elektoral sehingga memunculkan wilayah abu-abu antara kebijakan sosial yang legal dengan praktik politik uang yang terselubung. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah dokumen APBD Kota Padang, peraturan perundang-undangan terkait bansos dan pemilu, laporan kelembagaan, jurnal akademik, serta pemberitaan media mengenai distribusi bantuan menjelang pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi lonjakan anggaran bansos pada tahun 2023 tahun pra-pemilu yang diikuti penurunan drastis pada 2024, mencerminkan pola *pre-electoral resource mobilization*. Penyaluran bansos yang terkonsentrasi pada bulan November-Desember semakin menegaskan adanya strategi distribusi yang beririsan dengan momentum politik. Pola tersebut bekerja melalui relasi pemerintah, relawan politik, dan pemilih sehingga menciptakan persepsi timbal balik yang menyerupai mekanisme politik uang meskipun tidak eksplisit. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa bansos dapat berfungsi sebagai kekuatan politik yang efektif dan menjadi bentuk vote-buying terselubung yang sulit ditangkap secara hukum namun kuat secara sosiologis. Temuan ini memperkuat urgensi regulasi pengawasan bansos menjelang pemilu dan pentingnya memisahkan dengan jelas peran negara sebagai pemberi kesejahteraan dari kepentingan elektoral aktor politik.

Kata kunci: bantuan sosial, politik uang, pemilu Padang, grey area, distribusi bansos.

PENDAHULUAN

Bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial. Secara normatif, bansos hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok miskin dan rentan melalui pemberian dukungan material yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta menjamin keberlanjutan ekonomi rumah tangga penerima (Nurahman et al., 2025). Konsep dasar kebijakan ini berakar pada prinsip equity, yang menempatkan negara sebagai pemberi jaminan sosial melalui mekanisme distribusi yang objektif, adil, transparan, serta bebas dari intervensi kepentingan politik (Febriyanti & Sapa, 2025). Dengan demikian, bansos secara ideal merupakan instrumen pemerintah yang bersifat sosial, bukan arena transaksional yang bertujuan memperoleh dukungan kekuasaan.

Namun dalam praktiknya, implementasi bansos tidak jarang menunjukkan dinamika yang berbeda dari kerangka ideal tersebut. Penyaluran bantuan sering kali bersinggungan dengan kontestasi politik, terutama pada periode menjelang pemilihan umum. Ketika bansos disalurkan dalam momentum politik tertentu, terlebih dengan keterlibatan aktor politik atau simbol-simbol kekuasaan, maka batas antara program kesejahteraan dan kepentingan elektoral menjadi tidak mudah dibedakan. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu atau *grey area*, di mana bantuan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan warga justru berubah menjadi instrumen mobilisasi suara.

Fenomena tersebut menjadi semakin signifikan dalam konteks Pemilu lokal tahun 2024 di Kota Padang, di mana data anggaran menunjukkan adanya peningkatan belanja bansos pada tahun pra-pemilu, diikuti dengan penurunan kembali setelah kontestasi politik berlangsung. Fakta ini mengindikasikan adanya korelasi antara alokasi bansos dan dinamika elektoral, yang membuka ruang analisis mengenai kemungkinan terjadinya politisasi program kesejahteraan.

Pada saat yang sama, laporan mengenai pembagian bantuan berupa minyak goreng, sembako, serta uang tunai selama masa kampanye menunjukkan indikasi praktik pemberian material yang dapat dikategorikan sebagai bentuk politik uang, apabila tujuannya terkait upaya memperoleh dukungan suara. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak jarang menafsirkan bansos sebagai bentuk bantuan balas jasa yang membangun kewajiban moral untuk memberikan dukungan elektoral, bukan sebagai hak sosial yang melekat pada kewarganegaraan.

Kondisi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pemerataan kesejahteraan, tetapi juga berhubungan langsung dengan kualitas demokrasi (Iskandar, 2021). Ketika bansos digunakan sebagai alat pertukaran elektoral, maka preferensi politik masyarakat dibentuk berdasarkan insentif materi

jangka pendek, bukan berdasarkan evaluasi terhadap program, kinerja, maupun visi kandidat. Pola demikian menggeser demokrasi dari arena deliberatif menuju arena transaksional, yang pada akhirnya mengikis rasionalitas politik warga dan mengaburkan makna partisipasi demokratis. Selain itu, penggunaan bansos sebagai modal elektoral berpotensi menciptakan ketidakadilan distribusi, meningkatkan kecemburuan sosial, serta merusak legitimasi pemerintahan (Yanthi, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi pedoman dalam penelitian ini yaitu, penelitian pertama pada karya Haekal dkk (Haekal et al., 2025) yang mengkaji Problematika Hukum Pemberian Bantuan Sosial Pada Masa Pemilu. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa penyaluran bansos sering kali bergeser dari fungsi sosial menjadi instrumen politik terselubung ketika aktor politik memanfaatkannya untuk membangun loyalitas elektoral. Selaras dengan itu, Mahpudin dan Lestari (Mahpudin, n.d.) dalam penelitiannya berjudul Pemilihan Serentak di Tengah Pandemi COVID-19; Politisasi Anggaran dan Bantuan Sosial olwh Petahana menemukan bahwa calon petahana kerap memanfaatkan bansos sebagai alat mempertahankan dukungan publik.

Penelitian terakhir yaitu studi Irmawati, Juainah & Siti Anisyah (Irmawati, Norma Juainah, 2025) berjudul Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Pali Tahun 2024. Penelitian ini tidak secara spesifik meneliti bantuan sosial, namun membahas secara mendalam mekanisme terjadinya politik uang di tingkat lokal. Temuan mereka menunjukkan bahwa transaksi politik umumnya terjadi melalui pola patron-klien, pemberian barang atau uang, serta pendekatan personal kepada pemilih.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa studi mengenai bantuan sosial dan politik uang telah banyak dibahas, namun belum ada penelitian yang secara khusus memfokuskan pada fenomena batas tipis antara keduanya dalam konteks Pemilu Lokal di Kota Padang tahun 2024. Sebagian besar riset sebelumnya hanya melihat politisasi bantuan sosial pada situasi pemilu secara makro atau pada daerah lain di Indonesia, sementara penelitian yang menganalisis keterhubungan langsung antara distribusi bansos dan praktik vote-buying dalam lingkup lokal Padang masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan ruang baru bagi pengembangan teori dan pemahaman mengenai fenomena batas tipis antara bantuan sosial dengan politik uang dalam pemilu lokal Kota Padang tahun 2024. Oleh karena itu pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana dinamika batas tipis antara bantuan sosial dan politik uang dalam pemilu lokal di kota padang tahun 2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research), karena seluruh proses pengumpulan datanya dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fenomena politisasi bantuan sosial pada Pemilu 2024 di Kota Padang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengurai secara konseptual hubungan antara bantuan sosial sebagai instrumen kekuatan politik dan praktik politik uang yang berjalan secara terselubung dalam bentuk *grey area*. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder seperti buku akademik mengenai teori clientelisme, patronase, politik uang, dan perilaku pemilih, jurnal ilmiah yang membahas dinamika elektoral dan strategi distribusi bansos, regulasi resmi seperti Undang-Undang Pemilu, PKPU, Permensos terkait bansos, serta dokumen APBD dan laporan realisasi bantuan sosial di Kota Padang tahun 2023-2024.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pemberitaan media kredibel, laporan investigatif, dan publikasi lembaga pengawas pemilu yang mengungkap pola distribusi bansos menjelang pemilu serta potensi pemanfaatannya sebagai alat pengaruh politik. Melalui pendekatan studi pustaka, data dari berbagai literatur tersebut dianalisis secara kritis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, motif, dan mekanisme politisasi bansos serta batas konseptual antara bantuan sosial yang legal dengan praktik politik uang. Dengan demikian, penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana bantuan sosial diposisikan sebagai kekuatan politik dalam kontestasi elektoral di Kota Padang tanpa bergantung pada pengumpulan data primer.

HASIL DAN DISKUSI

Dinamika Distribusi Bansos Kota Padang

Dinamika distribusi bantuan sosial di Kota Padang selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan tidak berdiri di ruang yang steril dari kepentingan politik. Idealnya, bansos diberikan sebagai alat intervensi negara dalam mengatasi kerentanan ekonomi masyarakat. Namun, jika melihat pergerakan anggaran dan pola penyaluran, terdapat ritme yang tidak netral dan seolah mengikuti arah kepentingan kekuasaan. Artinya, dinamika distribusi bansos tampak sangat erat hubungannya dengan momentum politik, terutama saat memasuki periode pemilihan umum tahun 2024.

Data distribusi bansos Kota Padang dari tahun 2022 hingga 2024 dapat dijadikan pijakan utama. Pada 2022, Pemerintah Kota Padang menetapkan anggaran bansos sebesar Rp 12,57 miliar

dengan realisasi Rp 9,71 miliar. Tahun tersebut dapat disebut fase stabil, belum terlihat indikasi kuat politisasi. Namun keadaan berubah drastis pada tahun 2023. Anggaran meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp 20,03 miliar dengan realisasi Rp 16,49 miliar atau 82,35 persen. Kenaikan yang signifikan ini tidak terjadi secara gradual, melainkan melonjak tajam hanya dalam satu tahun. Setelah memasuki tahun 2024 tahun pelaksanaan pemilu justru terjadi penurunan drastis. Anggaran turun menjadi Rp 8,96 miliar dengan realisasi Rp 4,95 miliar atau 55,21 persen (Keuangan, 2025).

Tabel 1 Belanja Bantuan Sosial Kota Padang (2022-2024)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2022	12,57 M	9,71 M	77,21%
2023	20,03 M	16,49 M	82,35%
2024	8,96 M	4,95 M	55,21%

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan djpk kementerian keuangan

Dari tabel terlihat bahwa tahun 2023 merupakan tahun puncak, sedangkan 2024 menjadi titik terendah. Jika diuji secara logis, kebutuhan masyarakat tidak menurun drastis hanya karena memasuki tahun pemilu. Kemiskinan tetap berlangsung, inflasi tetap mengancam, harga pangan tidak menurun. Artinya, penurunan anggaran di tahun 2024 tidak mencerminkan turunnya kebutuhan sosial, tapi mengindikasikan bahwa peningkatan pada 2023 memiliki orientasi selain kesejahteraan. Pola seperti ini dalam kajian politik sering dibaca sebagai puncak distribusi sebelum kontestasi, atau *pre-electoral resource mobilization*, yaitu strategi meningkatkan bantuan ketika suara masyarakat masih dapat dipengaruhi dan menurunkannya setelah pemilihan usai.

Fenomena ini semakin terlihat jelas ketika kita menelusuri pola realisasi bansos sepanjang tahun 2023. Jika anggaran besar ini difungsikan murni untuk pemenuhan kebutuhan sosial, seharusnya penyaluran dilakukan secara merata dari Januari hingga Desember. Namun kenyataannya, mayoritas anggaran justru terkonsentrasi pada dua bulan terakhir mendekati pemilu November dan Desember.

Tabel 2 Realisasi Belanja Bansos Kota Padang Tahun 2023 per Bulan

Bulan	Anggaran Tahunan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
September	20,03 M	2,70 M	13,49%
Oktober	20,03 M	2,70 M	13,49%
November	20,03 M	6,60 M	32,94%
Desember	20,03 M	16,49 M	82,35%

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan DJPK kementerian keuangan

Ketika angka pada table tersebut dipetakan dalam konteks politik, gambarannya semakin jelas. November-Desember merupakan periode dimana masyarakat berada dalam intensitas politik yang tinggi kampanye sedang berlangsung, pengenalan kandidat meningkat, dan pemilih berada dalam fase mempertimbangkan pilihan. Di sinilah korelasi paling kuat terbentuk. Bansos tidak hanya disalurkan sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi sebagai alat persuasi politik yang tersamar. Penyaluran masif di ujung tahun bukan kebetulan administratif, melainkan momen strategis secara psikologis.

Selain itu, masa Desember berdekatan dengan masa tenang pemilu, dimana kampanye visual dan verbal mulai dibatasi. Pada kondisi ini, bantuan material justru menjadi media yang paling efektif karena dapat menyentuh ruang domestik masyarakat tanpa melanggar aturan kampanye. Artinya, distribusi bansos tidak hanya terkait stabilitas fiskal, tetapi juga komunikasi politik yang bekerja melalui nama bantuan. Ia hadir tanpa suara, namun mempengaruhi suara. Pola tersebut memperlihatkan bahwa bantuan sosial mampu menjadi medium politik yang kuat. Ketika masyarakat menerima bantuan saat momentum politik menguat, interpretasi bantuan berubah. Tidak lagi dimaknai sebagai hak sosial, tetapi sebagai bentuk perhatian, kemurahan hati, bahkan kedekatan emosional. Pemilih yang seharusnya menentukan pilihan secara rasional terhadap program, visi, atau rekam jejak kandidat, akhirnya cenderung menimbang keputusan berdasarkan siapa yang hadir memberi sesuatu di masa sulit. Maka yang mengalir bukan hanya bansos, tetapi juga dukungan politik.

Dengan demikian, dinamika distribusi bansos Kota Padang bukan sekadar fluktuasi anggaran, melainkan cermin interaksi antara kebijakan sosial dan kepentingan elektoral. Lonjakan anggaran pada 2023, penurunan tajam pada 2024, serta penumpukan realisasi pada November-Desember menunjukkan bahwa bansos memiliki fungsi ganda yaitu menolong masyarakat dan sekaligus menjadi instrumen komunikasi kekuasaan.

Bansos dalam Perspektif Politik Uang Edward Aspinall dan Sukmajati

Bantuan sosial dalam kontestasi politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari analisis Edward Aspinall dan Sukmajati tentang politik uang. Aspinall dan Sukmajati memandang *money politics* bukan hanya sebagai praktik pemberian uang secara langsung kepada pemilih, tetapi sebagai ekosistem pertukaran material yang bekerja melalui relasi sosial, persepsi, serta kalkulasi timbal balik antara aktor politik dan masyarakat. Dalam pandangan mereka, praktik politik uang bersifat cair, fleksibel, dan adaptif terhadap situasi sosial yang ada, termasuk ketika bantuan sosial

yang berasal dari anggaran negara digunakan secara strategis pada momentum *electoral* (Yusuf et al., 2024).

Dalam perspektif ini, bansos dapat dikategorikan sebagai bentuk *political distribution*, yakni distribusi material yang dilakukan dengan tujuan membentuk orientasi politik publik. Bansos bekerja lebih halus dibanding serangan fajar karena tampil dalam kemasan kebijakan resmi dan bersifat legal dari sisi administratif. Namun dalam sudut pandang Aspinall dan Sukmajati, legalitas anggaran tidak menghapus kemungkinan muatan elektoral di baliknya. Politik uang tidak harus ilegal untuk dapat dikategorikan sebagai *vote-buying*, selama terdapat pertukaran antara barang atau jasa dengan dukungan politik, baik eksplisit maupun implisit.

Fenomena kenaikan anggaran bansos pada Kota Padang tahun 2023, yang diikuti penurunan pada 2024, memperkuat asumsi terjadinya *pre-election disbursement strategy*, yakni strategi pelepasan bantuan dalam skala besar menjelang pemilu. Ketika bantuan terkonsentrasi pada bulan November-Desember periode pemanasan politik dan memasuki masa tenang bansos tidak lagi netral sebagai kebijakan kesejahteraan. Kondisi ini menggambarkan bentuk transaksi politik tidak langsung. Perdebatan muncul ketika sejumlah pihak menilai bahwa bansos tidak dapat dikategorikan sebagai politik uang, sebab ia merupakan program negara yang memiliki basis hukum. Namun justru hal ini menempatkan ruang perdebatan sebagai inti dari *clientelistic ambiguity*, atau wilayah abu-abu yang sulit ditentukan apakah suatu bantuan adalah kebijakan sosial atau alat transaksi elektoral. Ia dapat bekerja melalui distribusi program formal yang dipolitisasi. Legalitas administratif tidak membatalkan sifat transaksional jika persepsi pemilih menangkap bahwa bantuan mengandung pesan politik di dalamnya.

Faktor yang membentuk wilayah abu-abu ini dapat ditelusuri dalam empat aspek utama yaitu; momentum penyaluran, aktor yang mendistribusikan, jumlah bansos yang didistribusikan dan media pendistribusian. Implikasinya dari permasalahan ini persepsi masyarakat akan ikut berubah. Politik uang bekerja bukan karena masyarakat miskin dan mudah dipengaruhi, tetapi karena ada timbal balik yang dipahami secara sosial. Rasa terima kasih berkembang menjadi memori politik, dan memori politik berubah menjadi loyalitas elektoral.

Grey Area: Bansos sebagai Politik Uang Terselubung

Fenomena bantuan sosial di masa elektoral tidak selalu hadir sebagai tindakan politik uang yang eksplisit, tetapi kerap berjalan dalam bentuk yang jauh lebih halus, samar, dan sulit dibuktikan. Pada titik inilah bantuan sosial memasuki ranah yang disebut *grey area*, yaitu wilayah abu-abu antara kebijakan kesejahteraan publik yang sah dan praktik pertukaran politik electoral

berbasis materi. Dalam wilayah ini, bansos tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai politik uang secara hukum, tetapi memiliki karakteristik politik uang secara sosiologis, psikologis, dan perseptual. Dengan kata lain, yang diperdagangkan bukanlah uang dalam amplop, melainkan akses terhadap kesejahteraan negara yang ditukar dengan loyalitas politik pemilih.

Grey area muncul ketika program sosial yang seharusnya bersifat universal dan non-politis justru mengalir deras dalam momentum politik tertentu, dan bahkan melibatkan actor-aktor politik yang memiliki kepentingan elektoral. Pada kondisi seperti ini, bansos dapat berfungsi sebagai media kampanye tanpa slogan, sebagai janji politik tanpa pidato, bahkan sebagai bentuk *vote buying* tanpa amplop. Pembagian minyak goreng, sembako, hingga distribusi bansos resmi dari APBD pada akhir 2023 di Kota Padang menampilkan pola tersebut. Bantuan yang turun bersamaan dengan masa kampanye, disalurkan melalui jaringan relawan, dan diterima masyarakat tepat sebelum pemilih masuk ke bilik suara memunculkan penafsiran yang berbeda dibanding bantuan yang diberikan pada situasi normal. Bansos tidak sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi mengirimkan pesan simbolik yaitu ada pihak yang hadir, memberi, dan patut diberi balasan.

Grey area juga diperkuat oleh sifat bansos itu sendiri yang legal, terbuka, dan nasional, sehingga sulit dibedakan antara program kesejahteraan dan alat mobilisasi elektoral. Pemerintah dapat berargumen bahwa bansos disalurkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara, dan secara administratif argumen tersebut benar. Namun di lapangan, terkhusus dalam konteks Kota Padang, peningkatan besar pada 2023 dan penyaluran padat di November-Desember bergeser maknanya. Bansos hadir tepat ketika suara sedang diperebutkan. Pada titik ini, publik tidak lagi melihat bansos sebagai hak, tetapi sebagai hadiah. Ketika hak berubah menjadi hadiah, maka kekuasaan memiliki ruang untuk menuntut balasan dalam bentuk suara.

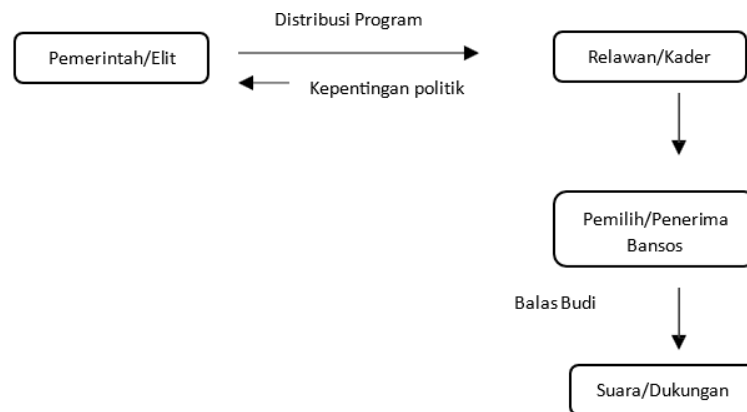
Dengan demikian, bansos sebagai politik uang terselubung tidak dapat dilihat hanya dari aspek legalitasnya, tetapi dari cara ia bekerja dalam kesadaran sosial pemilih. Bansos menjadi politik uang bukan karena bentuknya ilegal, tetapi karena ia menimbulkan rasa hutang budi, kesadaran timbal balik, dan loyalitas politik dalam tubuh masyarakat. *Grey area* muncul bukan karena bansos melanggar aturan administratif, tetapi karena ia bekerja sebagai strategi elektoral yang tersembunyi di balik wajah kesejahteraan. Politisasi yang tidak pernah terucap justru menjadi senjata terkuatnya.

Skema Jalur Distribusi Bansos Menuju Preferensi Suara

Distribusi bantuan sosial dalam konteks elektoral tidak bergerak secara linear dan sederhana. Ia melalui rantai aktor yang secara fungsional membentuk aliran pengaruh politik dari

elit kepada masyarakat, dan kemudian kembali kepada elit dalam bentuk suara pada hari pemilihan. Jalur distribusi ini berperan sebagai mesin reproduksi loyalitas politik, yang bekerja bukan hanya pada tingkat material, tetapi juga memori, persepsi, dan pertukaran sosial. Berikut skema untuk menggambarkan alur tersebut.

Gambar 1 Skema Distribusi Bantuan Sosial-Preferensi Suara



Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan beberapa sumber

Alur distribusi bansos memperlihatkan bagaimana bantuan bergerak dari pusat kekuasaan menuju masyarakat, lalu mengalami transformasi menjadi dukungan politik yang nyata. Meski demikian, proses ini tidak terjadi secara otomatis. Setiap simpul dalam rantai distribusi memainkan peran yang berbeda namun saling berkaitan dan menentukan berhasil tidaknya konversi bantuan menjadi suara. Untuk memahami mekanisme ini, perlu dilihat bagaimana setiap lapisan bekerja dalam logika elektoral.

Tahap pertama dimulai dari pemerintah dan elit politik, yaitu aktor yang memiliki kapasitas kontrol atas sumber daya publik. Pada titik ini, bansos masih tampil sebagai kebijakan negara yang sah secara administratif anggarannya disahkan, regulasinya jelas, dan tujuan sosialnya formal. Namun dalam konteks menjelang pemilu, fungsi bansos dapat bergeser secara perlahan. Pemerintah dan elit politik tidak hanya menentukan besaran dan bentuk bantuan, tetapi juga waktu penyaluran yang sangat menentukan dampak politiknya. Ketika anggaran tiba-tiba meningkat pada tahun pra- pemilu seperti yang terjadi di Kota Padang pada 2023 maka bansos tidak lagi berdiri netral sebagai instrumen kesejahteraan. Ia mulai berperan sebagai bagian dari strategi konsolidasi dukungan politik, terutama jika penyaluran dilakukan mendekati fase kampanye.

Distribusi dari pusat kemudian bergerak ke simpul berikutnya, yaitu relawan dan kader politik yang bertindak sebagai penghubung langsung antara kekuasaan dan pemilih. Pada tahap inilah bantuan yang awalnya administratif berubah menjadi personal. Relawan menjadi perpanjangan tangan

yang membawa bukan hanya barang, tetapi juga narasi tentang siapa yang patut diberi rasa terima kasih. Mereka mengantarkan sembako bukan dalam bentuk program negara yang abstrak, tetapi sebagai pemberian yang memiliki identitas politis. Di titik ini, bantuan sosial mulai mengundang persepsi balas budi, sesuatu yang sulit dikategorikan sebagai pelanggaran hukum namun kuat dalam efek elektoralnya.

Ketika bantuan tiba di tangan pemilih, simpul ketiga pun terbentuk. Penerima tidak hanya memperoleh barang untuk kebutuhan pangan mereka, tetapi juga menangkap pesan politik secara implisit. Hubungan ini bekerja dalam wilayah *clientelistic exchange*, sebagaimana dijelaskan Edward Aspinall, yaitu suatu pertukaran yang tidak diucapkan secara eksplisit tetapi dipahami secara sosial melalui prinsip timbal balik (Yusuf et al., 2024). Pemberian bantuan terutama dalam situasi ekonomi sulit dan dalam jarak waktu yang berdekatan dengan pemilu menciptakan memori yang kuat dan rasa terima kasih yang cenderung dibalas melalui pilihan politik. Di sinilah logika transaksional bekerja halus, tidak ada janji tertulis, tidak ada pernyataan “pilih saya,” namun struktur hubungan sosial membentuk kewajiban moral untuk membalas.

Dengan demikian, alur distribusi bansos bukan hanya rantai logistik, tetapi rantai pengaruh. Dari pemerintah ke relawan, dari relawan ke pemilih, dan dari pemilih kembali ke bilik suara sebagai dukungan elektoral. Semua berjalan legal, tetapi sarat ekonomi politik. Semua tampak sebagai kebijakan publik, namun menyimpan fungsi elektoral. Di titik abu-abu inilah, bansos menjadi politik uang terselubung yang paling efektif bukan karena memaksa, tetapi karena diterima dengan sukarela.

Kesimpulan

Fenomena penyaluran bantuan sosial pada Pemilu Lokal Padang 2024 menunjukkan adanya batas tipis antara kebijakan kesejahteraan negara dan praktik politik uang. Secara normatif bansos merupakan instrumen negara untuk melindungi masyarakat rentan, namun pada konteks elektoral ia bertransformasi menjadi simbol pertukaran dukungan yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, tetapi dipahami melalui logika sosial saling membalas. Kenaikan anggaran bansos yang signifikan pada tahun pra-pemilu 2023 dan lonjakan distribusi pada bulan-bulan akhir sebelum pemungutan suara memperlihatkan bahwa program sosial tidak lagi berjalan dalam ritme administrasi reguler, tetapi mengikuti irama kontestasi politik.

Pola kenaikan diperkuat oleh keterlibatan relawan, kader, dan jaringan politik lokal dalam distribusi bantuan, yang kemudian menciptakan ruang interpretasi bahwa bansos bukan lagi sekadar hak warga, melainkan hadiah politik dari tokoh atau aktor tertentu. Dalam kondisi tersebut,

masyarakat sering berada pada posisi ambigu menerima bantuan sebagai kebutuhan ekonomi, namun sekaligus menangkap pesan elektoral yang melekat pada proses pembagian. Pemilih mungkin tidak diminta secara langsung untuk memilih, tetapi hadirnya logika *reciprocity* diberi lalu merasa harus membalas membuat bansos berfungsi sebagai modal elektoral yang sah secara administratif, namun bermuatan politis secara substantif. Inilah yang menjadi inti dari *grey area*, praktik tidak dapat disebut pelanggaran hukum secara mutlak, tetapi juga tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan elektoral.

Dengan demikian, kasus Padang 2024 memperlihatkan bahwa jarak antara kebijakan publik dan politik uang tidak selalu berada pada dua kutub yang terpisah. Keduanya dapat saling berdampingan, saling menyalur, bahkan menjadi saluran yang sama ketika bantuan sosial diproduksi, didistribusikan, dan diingat dalam konteks pemilihan. Bansos tetap legal dalam strukturnya, namun dapat bekerja seperti politik uang dalam efek politiknya. Dari sinilah terlihat bahwa demokrasi lokal menghadapi tantangan serius. Beberapa rekomendasi yang dapat saya tawarkan untuk menyikapi permasalahan ini adalah;

1. Memperketat regulasi penyaluran bantuan sosial agar tidak beririsan dengan momentum elektoral. Pemerintah perlu membatasi distribusi bansos pada 6 hingga 12 bulan menjelang pemilu dan menyusun aturan teknis yang melarang pembagian bantuan pada fase kampanye ataupun masa tenang. Untuk memperkuat kontrol publik, daftar penerima dan besaran anggaran harus dibuka secara transparan melalui kanal resmi pemerintah sehingga warga dapat mengawasi distribusi yang terjadi di lapangan.
2. Struktur penyaluran bansos perlu diperbaiki agar tidak lagi bergantung pada relawan politik atau jaringan informal yang rentan memunculkan kesan balas budi elektoral. Penyaluran harus dilakukan sepenuhnya oleh perangkat dinas yang resmi dan terverifikasi agar jalur distribusi menjadi lebih netral. Sistem pelaporan publik juga perlu disediakan dalam bentuk digital, sehingga masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyalahgunaan bansos secara langsung dan terdokumentasi.
3. Lembaga pengawas pemilu perlu diperkuat secara kelembagaan, baik dari sisi kewenangan maupun anggaran, agar memiliki kemampuan menindak kasus politisasi bansos yang selama ini kerap terjadi tanpa sanksi jelas.

Dengan langkah tersebut diharapkan adanya perubahan yang berjalan secara operasional, sistemik, dan berkelanjutan, sehingga bantuan sosial kembali pada fungsi sosial dasarnya menyejahterakan warga, bukan membeli suara mereka.

Daftar Pustaka

- Arianto, B., & Rahmadani, T. (2021). *Program Bansos dan Kerentanan Politisasi dalam Momentum Kampanye Pemilu*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1), 45–58.
- Berenschot, W. (2018). *Politik Uang dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Febriyanti, R., & Sapa, N. Bin. (2025). Keadilan Distributif Dan Peran Negara Konsep Dan Implementasinya. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 63–75.
- Haekal, A. Z., Nursasi, M. A., Hum, M., Studi, P., Tata, H., Fakultas, N., Islam, U., & Antasari, N. (2025). *Pada Masa Pemilu*. 30-40.
- Irmawati, Norma Juainah, S. A. (2025). *Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Pali Tahun 2024*. 14(2), 629–643.
- Iskandar, A. M. (2021). *Negara dan Politik Kesejahteraan* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keuangan, D.J.P.K (2025). *Portal Data APBD-DJPK Kemenkeu*.
- Mahpudin, F. M. L. (n.d.). *202-Article Text-1337-1-10-20210517*. 162–184.
- Nurahman, R., Hermawati, A., Wahdah, N., Alfiah, S., Afyah, N., Hardiyansyah, D., Helmi, L., & Herdiana, D. (2025). Efektivitas Program Bantuan Sosial Sebagai Sarana Kebijakan Ekonomi Publik. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 3(5), 215–219.
- Rully Firmansyah. (2025, Januari 10). Politik Uang di Pilkada Padang 2024: Pembagian Minyak Goreng Jadi Sorotan Utama Gugatan di MK. *Pikiran Rakyat Padang*. Editor: Tim Pikiran Rakyat Padang.
- Wijayanti, D. (2022). *Strategi Politisasi Bansos dalam Pemilu dan Persepsi Publik terhadap Program Kesejahteraan Negara*. Jurnal Demokrasi & Kebijakan Publik, 7(1), 67–88.
- Yanthi, I. N. S. dan N. P. D. (2025). *Inovasi dan Dinamika Bantuan Sosial* (I. B. W. Wigena)
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. (2024). Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>.

PERAN *WEAK TIES* PADA X TERHADAP PARTISIPASI PROTES MAHASISWA DI INDONESIA

Raysa Madinah Azzahra¹, Kunto Adi Wibowo², Ikhsan Fuady³, Detta Rahmawan⁴

Universitas Padjadjaran¹²³⁴

E-mail Coresponden: raysa24001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This study examines the role of weak ties in social media X in influencing student protest participation in Indonesia. The research focuses on X usage and weak ties in driving both online and offline protest participation. The approach used is a quantitative method with convenience sampling techniques involving Gen Z students who are active users of social media. Data were collected from 126 respondents through disturbing questionnaires with google form using likert scale method. The result produced good validity and reliability (Cronbach's Alpha > 0.60) and hypothesis testing through path analysis. The key finding reveals X usage has no significant effect on weak ties and does not directly increase protest behavior. Conversely, weak ties significantly influence protest behavior, highlighting the social networks role in engagement.

Keywords: *Weak Ties, X, Protest Participation*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana peran *weak ties* di media sosial X terhadap partisipasi protes mahasiswa di Indonesia. Tujuan penelitian ini berfokus pada penggunaan X serta *weak ties* dalam mendorong partisipasi protes secara daring maupun luring. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *convenience sampling* pada mahasiswa Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial X. Peneliti mendapatkan total 126 responden melalui penyebaran kuesioner dengan Google Form menggunakan metode skala likert. Hasil pengukuran menunjukkan uji validitas dan reliabilitas yang baik (Cronbach's Alpha > 0.60) serta uji hipotesis melalui analisis jalur. Temuan utama memperlihatkan bahwa penggunaan X tidak berpengaruh signifikan terhadap *weak ties* dan tidak secara langsung meningkatkan partisipasi protes. Sebaliknya, *weak ties* berpengaruh terhadap aksi protes, menekankan pada jaringan sosial lebih menentukan keterlibatan.

Kata Kunci : *Weak Ties, X, Partisipasi Protes*

PENDAHULUAN

Kehadiran media sosial telah membawa banyak perubahan pada paradigma politik serta kehidupan masyarakat. Kini publik tidak lagi pasif karena media telah menyediakan cara-cara baru untuk terlibat dalam politik (Omotayo, 2020). Melibatkan diri dalam aksi politik di media sosial seperti mengikuti gerakan politik, membagikan ulang komentar, serta berbagi pendapat mengenai isu kewarganegaraan dapat memprediksi partisipasi protes secara positif (Scherman et al, 2021). Selain itu, sifat media sosial yang terbuka dan *real-time* membuat para pengguna dapat memperluas jejaring antar individu maupun kelompok yang lain (Murthy, 2024).

Weak Ties Theory

Dalam karya Gravonetter "The Strength of Weak Ties" (1973), terdapat dua jenis hubungan sosial berdasarkan intensitasnya yaitu *weak ties* dan *strong ties*. *Weak ties* adalah hubungan yang memiliki frekuensi kontak dan intimasi rendah seperti kenalan atau teman dari teman kita. Sedangkan, *strong ties* mengacu pada hubungan emosional dan interaksi yang tinggi seperti keluarga dan teman dekat. *Weak-ties* memiliki kekuatan tersendiri sebagai penghubung dengan kelompok yang lebih jauh dan luas (Gamper, M. 2022).

Platform Berbasis Weak-Ties

Berbeda dengan dunia nyata yang didasari oleh *strong ties*, media sosial dibangun berdasarkan hubungan *weak-ties* (Khondoker, 2019). X memiliki keunikan yang mendukung pembentukan *weak ties* dimana pengguna tidak perlu meminta *folllback* agar dapat berinteraksi dengan akun lain (Durotoye et al., 2025). Fitur seperti tagar (#) dapat digunakan juga untuk mencari *tweet* yang berkaitan dengan minat, topik, atau komunitas tertentu (Murthy, 2024). Selain itu, X memungkinkan komunikasi secara langsung dengan orang-orang yang tidak dikenal secara personal seperti politisi, selebritas, atau jurnalis (Scherman et al., 2021; Valenzuela et al., 2017). Sehingga fitur pada X mempermudah penyebaran isu politik dan *exposure* yang beragam, mendorong pengguna untuk aktif dalam aktivitas politik.

Peran Weak-Ties dalam Memobilisasi Protes

Studi politik membagi aktivitas protes menjadi empat kategori utama, mulai dari tindakan tidak biasa, tindakan legal, tindakan ilegal tapi tidak kekerasan, hingga tindakan yang melibatkan kekerasan dan konfrontasi langsung (Okade et al., 2020). Petisi, boycott, demonstrasi, okupasi, dan pemogokan merupakan contoh dari bentuk protes. Internet telah membentuk pemahaman bahwa *weak-ties* berperan penting dalam mendukung aksi protes melalui tiga mekanisme utama, yaitu penyebaran informasi di jejaring sosial, perencanaan serta koordinasi logistik, dan cara peserta memperoleh informasi tentang gerakan protes tersebut (Schradi, 2018). *Weak-ties* juga memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam tanpa memerlukan perantara organisasi (Schradi, 2018). Mayoritas pengguna biasa (*peripheral participants*) memiliki peran besar dimana pesan yang mereka sebarluaskan serta konten-konten yang dihasilkan sama besarnya dengan kontribusi kelompok aktivis (Barbera et al., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Steinert Threlkeld (2015) mengamati pertumbuhan aktivitas koordinasi di X yang berkorelasi dengan protes massa. #BlackLivesMatter di Amerika Serikat juga

menjadi contoh nyata bagaimana pemanfaatan *weak-ties* di X membuat suatu isu dapat terlihat oleh berbagai kalangan, menjembatani perbedaan rasial dalam aksi mobilisasi gerakan (Simonson et al, 2024)

Dari pembahasan tersebut dihasilkan hipotesis sebagai berikut

Hipotesis 1 (H1) : Penggunaan X berpengaruh terhadap terbentuknya hubungan *weak ties*

Hipotesis 2 (H2) : *Weak Ties* berpengaruh terhadap partisipasi protes

Hipotesis 3 (H3) : Diduga ada keterkaitan secara tidak langsung antara penggunaan X dan partisipasi protes melalui dari *weak-ties*.

Sayangnya, studi mengenai bagaimana *weak-ties* pada media sosial X secara spesifik memengaruhi partisipasi protes masih kurang digali di Indonesia. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, banyak gerakan protes massa yang dipengaruhi oleh media sosial X seperti #IndonesiaGelap pada 2024 serta #17TuntutanRakyat pada 2025. Riset menunjukkan bahwa ikatan solidaritas antara para demonstran yang berbeda paham politik terbentuk saat mereka bertemu langsung di publik, bukan melalui interaksi di dunia maya. Para demonstran biasanya tidak mengajak kenalan internetnya untuk turun jalan dan unjuk rasa sendiri bukan ajang mencari teman baru (Ozduzen et al., 2023). Maka dari itu, penelitian semacam ini penting mengingat hubungan di dunia nyata juga berperan dalam sebuah gerakan, sejalan dengan hubungan digital melalui *weak ties*. Tujuan dari penelitian ini lebih melihat bagaimana *weak ties* bisa berperan penting dalam melahirkan gerakan aksi massa di Indonesia melalui platform X.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif mengacu pada analisis data berupa angka yang menggunakan perhitungan statistik guna menjawab rumusan masalah dan hipotesis dalam penelitian (Jannah et al, 2022).

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif di Indonesia yang menggunakan platform media sosial X. Populasi ini dipilih karena generasi muda menjadi generasi yang memiliki ketergantungan tinggi dalam bermedia sosial. Dalam menghitung ukuran sampel, peneliti menggunakan G*Power dan mendapatkan total 87 orang sebagai jumlah minimum. Peneliti berhasil mendapatkan 126 responden sebagai sampel dengan menggunakan teknik sampling *non probability* jenis *convenience sampling*. Pemilihan teknik ini berdasarkan ketersediaan serta kemudahan akses untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form. Kuesioner yang disusun dalam Google Form kemudian dianalisis menggunakan format perhitungan skala Likert. Skala likert dapat berfungsi untuk mengukur sikap, pandangan, serta pendapat seseorang atau sekelompok individu terkait suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Indikator yang digunakan dalam kuesioner merujuk pada literatur milik Valenzuela (2017) serta Durotoye (2025). Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan perangkat SmartPLS untuk melakukan *path analysis* yaitu bentuk khusus dari *Structural Equation Modeling* (SEM) dalam menguji hubungan kasual antar variabel dalam model.

HASIL DAN DISKUSI

Dari 126 responden yang diperoleh sebagai sampel penelitian, berikut merupakan tabel karakteristik demografi responden dalam penelitian ini.

Tabel 1. Data Demografi Responden

Faktor Demografi	Kategori	Frekuensi	Persenan
Jenis Kelamin	Perempuan	114	90%
	Laki-laki	11	9%
Usia	17	1	1%
	18	9	7%
	19	38	30%
	20	20	16%
	21	31	25%
	22	17	13%
	23	3	2%
	24	4	3%

Komposisi responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan persentase sebanyak 90%. Kemudian, usia responden berkisar rentang 17-24 tahun dan sebagian berumur 19 tahun dengan persentasi yaitu 30%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden penelitian ini adalah mahasiswa perempuan berusia 19 tahun.

Tabel 2. Hasil Validitas dan Relibilitas

Konstruksi	Cronbach's Alpha	rho_a	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Penggunaan X (X)	1.000	1.000	1.000	1.000
Weak-Ties (Z)	0.674	0.713	0.816	0.599
Partisipasi Protes (Y)	0.781	0.805	0.852	0.539

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas dan validitas pada **Tabel 2**, Suatu instrumen penelitian dapat diandalkan (*reliable*) apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016). Dapat dilihat bahwa keseluruhan variabel telah melewati saran minimum dengan nilai berkisar 0.674-1.000. Nilai *composite reliability* (rho_c) untuk semua variabel juga menunjukkan hasil yang baik (>0.6). Hal ini menggambarkan bahwa semua variabel telah menunjukkan hasil yang konsisten, serta alat ukur yang digunakan peneliti masih dapat diandalkan. Pada bagian *Average Variance Extracted* (AVE) serta rho_a, nilai ketiga variabel >0.50, mengartikan indikator-indikator dari hasil konstruksi pada penelitian ini konsisten serta memadai dalam menjelaskan konsep-konsep setiap variabel secara menyeluruh.

Tabel 3. Hasil Loading Factor

Variabel	Item Pengukuran	Indikator	Outer Loading
Penggunaan X (X)	UOT	Dalam satu pekan, seberapa sering rata-rata Anda menggunakan media sosial Twitter/X? (1 = Satu hari - 7 = Setiap hari)	1.000
Weak-Ties (Z)	WT1	Seberapa sering Anda berdiskusi tentang politik dan isu publik secara <i>online</i> dengan kenalan Anda?	0.824

Variabel	Item Pengukuran	Indikator	Outer Loading
		(1 = STP – 5 = STS)	
	WT2	Seberapa sering Anda berdiskusi tentang politik dan isu publik secara <i>online</i> dengan orang yang tidak kenal?	0.821
	WT3	Seberapa sering Anda berdiskusi tentang politik dan isu publik secara online dengan tetangga dan teman kuliah Anda?	0.665
Partisipasi Protes (Y)	P1	Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering Anda mengikuti demonstrasi? (0 = tidak pernah – 5 = sangat sering/selalu)	0.748
	P2	Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering Anda mengikuti boikot?	0.530
	P3	Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering Anda bergabung dalam gerakan di X (Twitter)?	0.776
	P4	Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering Anda menghadiri forum diskusi politik secara langsung?	0.821
	P5	Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering Anda menandatangani petisi?	0.761

Bedasarkan hasil perhitungan cross loading di **Tabel 3**, Indikator yang dipakai untuk semua variabel adalah valid. Hampir seluruh nilai outer loading > 0.7 mengartikan setiap indikator memiliki kontribusi yang signifikan. Meskipun terdapat indikator pada variabel *weak ties* dan partisipasi politik yang dibawah batas minimum (0.7), indikator tersebut masih tetap bisa dipertahankan karena nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dari variabel tersebut bernilai > 0.5 yang mengartikan indikator tersebut valid. Variabel *weak-ties* terlihat lebih kuat dicerminkan oleh item pengukuran WT1 yaitu diskusi bersama kenalan. Sedangkan pada variabel partisipasi protes, item pengukuran P3 dan P4 mempunyai outer loading tertinggi (0.776) dan (0.821) yang menunjukkan partisipasi protes dalam bentuk diskusi forum dan mengikuti gerakan di X sudah sangat baik dijalankan oleh para mahasiswa.

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi

Hipotesis	Path Coefficients	T-Statistic	P - Value
H1 : Penggunaan X (X) \rightarrow <i>Weak-Ties</i> (Z)	0.054	0.618	0.537
H2 : <i>Weak-Ties</i> (Z) \rightarrow Partisipasi Protes (Y)	0.441	5.202	0.000
H3 : Penggunaan X (X) \rightarrow <i>Weak-Ties</i> (Z) \rightarrow Protes (Y)	0.036	0.584	0.560
Variabel Kontrol			
<i>Exposure To News</i> \rightarrow Penggunaan X	0.351	3.791	0.000
<i>Political Efficacy</i> \rightarrow Protes	0.340	3.832	0.000
<i>Political Interest</i> \rightarrow Protes			

Untuk melihat apakah hubungan setiap variabel memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik, maka diperlukan nilai *path coefficient* yang bernilai positif dengan nilai T-Statistic ≥ 1.96 , dan nilai P-Value ≤ 0.05 . Ditinjau hasil pada **Tabel 4**, Tidak terdapat bukti bahwa penggunaan X memiliki pengaruh terhadap hubungan *weak-ties* karena diketahui nilai P-Values = 0,000 $< 0,05$ sebesar 0.537 (**H1**). Namun, hubungan *weak-ties* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap partisipasi protes dengan nilai $P\text{-Values} = 0,000 > 0,05$ (**H2**). Semakin kuat suatu hubungan *weak ties*, maka semakin tinggi juga partisipasi mahasiswa dalam protes. Penggunaan X juga tidak terbukti memiliki pengaruh pada partisipasi protes dengan nilai $P\text{-Value}$ sebesar 0.823 (**H3**). Penggunaan X yang dimediasi oleh *weak ties* ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi protes akibat nilai $P\text{-Values} = 0,000 < 0,05$ sebesar 0.543.

Exposure to news, *Political Efficacy*, *Political Interest*, *Ideology*, jenis kelamin, dan usia ditambahkan sebagai variabel kontrol. Penambahan ini didasari oleh literatur rujukan yang dipakai untuk item pertanyaan serta penelitian terdahulu (Valenzuela, 2017). Hasil uji coba membuktikan bahwa, *ideology*, jenis kelamin, serta usia tidak ada asosiasi antara penggunaan X dan partisipasi protes. Tetapi, variabel *exposure to news*, *political efficacy*, dan *political interest* justru memiliki pengaruh yang signifikan dengan $P\text{-Value} = 0,000 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa faktor eksternal dapat menentukan mahasiswa dalam menggunakan X serta mendorong partisipasi protes.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua hipotesis yang diajukan dapat diterima. Penggunaan X tidak berpengaruh terhadap terbentuknya *weak-ties* maupun partisipasi protes mahasiswa. Justru, *weak ties* berpengaruh signifikan terhadap partisipasi protes. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam aksi protes tidak ditentukan dari segi intensitas menggunakan X, melainkan sejauh mana mereka memanfaatkan jaringan *weak-ties* untuk turut berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa X mewadahi terbentuknya hubungan *weak ties* yang mendorong mahasiswa untuk ikut terlibat dalam aksi protes daring maupun luring.

Temuan lain juga menunjukkan bahwa beberapa variabel kontrol seperti *exposure to news*, *political efficacy*, dan *political interest* memiliki pengaruh terhadap penggunaan X serta partisipasi protes. Hal ini menandakan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang mendorong mahasiswa terlibat dalam gerakan protes. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk memahami peran *weak ties* dalam partisipasi protes mahasiswa melalui X di Indonesia tercapai secara parsial.

Melihat dari sisi hipotesis dan model, peneliti menyarankan untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan menyisipkan variabel-variabel lain seperti kepercayaan terhadap institusi sehingga dapat menjelaskan secara lebih dalam bagaimana *weak ties* dapat bekerja dalam lingkup daring maupun luring. Selain itu, perlu adanya *digital trace* untuk menangkap dinamika pembentukan *weak ties* dan proses mobilisasi protes dari waktu ke waktu.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., & dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Barberá, P., Wang, N., Bonneau, R., Jost, J. T., Nagler, J., Tucker, J., & González-Bailón, S. (2015). The critical periphery in the growth of social protests. *PLoS ONE*, 10(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0143611>
- Durotoye, T., Goyanes, M., Berganza, R., & Gil de Zúñiga, H. (2025). Online and Social Media Political Participation: Political Discussion Network Ties and Differential Social Media Platform Effects Over Time. In *Social Science Computer Review*. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/08944393251332640>
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Granovetter, M. (1973). "The Strength of Weak Ties". *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360 - 1380.
- Khondoker, R. (2019). THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE POLITICAL PROTEST: THE CASE OF SHAHBAGH MOVEMENT. *International Journal of Advanced Research*, 7(7), 420–429. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/9377>
- Klärner, A., Gamper, M., Keim-Klärner, S., Moor, I., von der Lippe, H., Richter, M., & Vonneilich, N. (2022). Social networks and health inequalities: A new perspective for research. In *Social Networks and Health Inequalities: A New Perspective for Research*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-97722-1>
- Murthy, D. (2025). *Sociology of Twitter/X: Trends, Challenges, and Future Research Directions*. 18. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-031021>
- Omotayo, F. O., & Folorunso, M. B. (2020). Use of social media for political participation by youths in Oyo State, Nigeria. *eJournal of eDemocracy and Open Government*, 12(1), 133–158. <https://doi.org/10.29379/jedem.v12i1.585>
- Ozduzen, O., Aslan Ozgul, B., & Ianosev, B. (2024). 'Institutions of governance are all corrupted': anti-political collective identity of anti-lockdown protesters in digital and physical spaces. *Social Movement Studies*, 23(6), 676–694. <https://doi.org/10.1080/14742837.2023.2246920>
- Scherman, A., & Rivera, S. (2021). Social Media Use and Pathways to Protest Participation: Evidence

From the 2019 Chilean Social Outburst. *Social Media and Society*, 7(4).
<https://doi.org/10.1177/20563051211059704>

Schradie, J. (2018). Moral Monday Is More Than a Hashtag: The Strong Ties of Social Movement Emergence in the Digital Era. *Social Media and Society*, 4(1).
<https://doi.org/10.1177/2056305117750719>

Simonson, M. D., Block Jr, R., Druckman, J. N., Ognyanova, K., & Lazer, D. M. J. (2024). Black Networks Matter. In *Black Networks Matter*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781009415842>

Steinert-Threlkeld, Z. C., Mocanu, D., Vespignani, A., & Fowler, J. (2015). Online social networks and offline protest. *EPJ Data Science*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-015-0056-y>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Bandung: Alfabeta.

Valenzuela, S., Correa, T., & Gil de Zúñiga, H. (2018). Ties, Likes, and Tweets: Using Strong and Weak Ties to Explain Differences in Protest Participation Across Facebook and Twitter Use. *Political Communication*, 35(1), 117–134. <https://doi.org/10.1080/10584609.2017.1334726>